



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1088);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.

Pasal 2

- (1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. SBK umum; dan
 - b. SBK khusus.
- (2) SBK umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SBK yang berlaku untuk:
 - a. lebih dari 1 (satu); atau
 - b. seluruh, kementerian negara/lembaga.
- (3) SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian negara/lembaga.

Pasal 3

- (1) SBK umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Rincian indeks SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kementerian negara/lembaga menggunakan SBK umum dan SBK khusus dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
- (2) Penggunaan SBK umum dan SBK khusus bersifat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan kementerian negara/lembaga untuk melampaui besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kementerian negara/lembaga mengajukan permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menindaklanjuti permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dapat menyetujui permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. harga pasar;
 - b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau
 - c. perubahan tahapan.
- (6) Dalam hal permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada kementerian negara/lembaga untuk melakukan revisi anggaran.
- (7) Dalam hal permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada kementerian negara/lembaga pengusul.

Pasal 5

Pengawasan atas penggunaan SBK umum dan SBK khusus dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penggunaan SBK umum dan SBK khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga mulai tahun anggaran 2026.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM
PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO	Uraian
2	3
	1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran
XXXX.EBD.XXX	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
	2. SBK Layanan Pelatihan
	<i>a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan</i>
XXXX.EBC.XXX	1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama
XXXX.EBC.XXX	2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Blended Learning)
XXXX.EBC.XXX	3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator
XXXX.EBC.XXX	4) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)
XXXX.EBC.XXX	5) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas
XXXX.EBC.XXX	6) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)
	<i>b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan</i>
XXXX.EBC.XXX	1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
XXXX.EBC.XXX	2) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Blended Learning)
XXXX.EBC.XXX	3) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2
	3. SBK Layanan Audit Internal
XXX.EBD.XXX	a. Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama
XXX.EBD.XXX	b. Layanan Audit Internal Dalam Kota
XXX.EBD.XXX	c. Layanan Audit Internal Luar Provinsi
	4. SBK Pemantauan dan Evaluasi
XXXX.EBD.XXX	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator
XXXX.EBD.XXX	b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal
XXXX.FAE/UAE.XXX	c. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	5. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
XXXX.EBA.XXX	a. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator
XXXX.EBA.XXX	b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal
	6. SBK Layanan Bantuan Hukum
XXXX.EBA.XXX	a. Layanan Bantuan Hukum Pegawai
XXXX.EBA.XXX	b. Layanan Bantuan Hukum Institusi
	7. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)
XXXX.EBA.XXX	a. Layanan BMN untuk Satker Koordinator
XXXX.EBA.XXX	b. Layanan BMN untuk Satker Vertikal
	8. SBK Layanan Manajemen Kinerja
XXXX.EBD.XXX	a. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator
XXXX.EBD.XXX	b. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal
	9. SBK Layanan Manajemen Keuangan
XXXX.EBD.XXX	a. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator
XXXX.EBD.XXX	b. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal
	10. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia

Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO	Uraian
2	3
XXXX.EBC.XXX	a. Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT
XXXX.EBC.XXX	b. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil
XXXX.EBC.XXX	c. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang
XXXX.EBC.XXX	d. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar
	11. SBK Layanan Hukum
XXXX.EBA.XXX	Layanan Hukum
	12. SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
XXXX.EBA.XXX	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
	13. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
XXXX.EBD.XXX	a. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator
XXXX.EBD.XXX	b. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal
	14. SBK Layanan Reformasi Kinerja
XXXX.EBD.XXX	a. Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator
XXXX.EBD.XXX	b. Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal
	15. SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)
XXXX.ADA.XXX	a. RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri
XXXX.ADA.XXX	b. RSNI3 dengan Metode Adopsi Modifikasi
XXXX.ADA.XXX	c. RSNI3 dengan Metode Adopsi Indentik Terjemahan
XXXX.ADA.XXX	d. RSNI3 dengan Metode Adopsi Republikasi- <i>Reprint</i>
	16. SBK Riset dan Inovasi
XXXX.DDD/SDD.XXX	a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi
XXXX.DDB/SDB.XXX	b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi
XXXX.DDC/SDC.XXX	c. Model Hasil Riset dan Inovasi
XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX	d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi
XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX	e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi
XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX	f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi
	17. SBK Naskah/ Kebijakan Aktual Strategis
XXXX.ABA-ABW.XXX XXXX.PBA-PBW.XXX	Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis
	18. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga
XXXX.AAG/PAG.XXX	a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Internal
XXXX.AAG/PAG.XXX	b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Eksternal
	19. SBK Peraturan Presiden
XXXX.AAD/PAD.XXX	a. Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana
XXXX.AAD/PAD.XXX	b. Peraturan Presiden yang Bersifat kompleks
	20. SBK Peraturan Pemerintah
XXXX.AAC/PAC.XXX	a. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana
XXXX.AAC/PAC.XXX	b. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks
	21. SBK Rancangan Undang-Undang

Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO	Uraian
2	3
XXXX.AAA/PAA.XXX	a. Rancangan Undang-Undang Bersifat Sederhana
XXXX.AAA/PAA.XXX	b. Rancangan Undang-Undang Bersifat Kompleks
	22. SBK Peraturan Lainnya
XXXX.AAH/PAH.XXX	Peraturan Lainnya
	23. SBK Sosialisasi dan Diseminasi
XXXX.AEF/PEF.XXX	Sosialisasi dan Diseminasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

PENJELASAN SBK UMUM

A. Ketentuan Umum SBK Umum (SBKU)

1. Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) adalah kumpulan atas rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian *output* yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian *Output* (RO) merupakan keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
3. KRO dan RO mengacu pada pedoman penyusunan dan pemanfaatan klasifikasi rincian output dan rincian output dalam perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal yang membidangi anggaran pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan Deputy yang membidangi pembiayaan dan investasi pembangunan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Satuan Kerja Koordinator adalah satuan kerja pada tingkat unit Eselon I atau yang setara, atau pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyusunan dan pemanfaatan keluaran bagi satker vertikal dalam Aplikasi SAKTI.
5. Satuan Kerja Vertikal adalah unit organisasi lini pada Kementerian Negara/Lembaga yang berada langsung di bawah unit eselon I, berkedudukan di luar kantor pusat, serta memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penuangan Volume RO pada SBKU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SBKU yang menggunakan satuan layanan dibatasi maksimal 1 (satu) volume.
 - b. Dalam hal satker Koordinator:
 - 1) memiliki satker anggaran dibawahnya;
 - 2) menggunakan Jenis RO Dukungan Manajemen Internal dengan satuan layanan; dan
 - 3) pengalokasian anggarannya dilakukan secara terpusat;jumlah volume SBKU berdasarkan jumlah satuan kerja yang dikelola dengan menggunakan besaran SBKU yang berlaku pada satuan kerja vertikal, sepanjang tidak duplikasi dengan alokasi pada RO yang sama pada satker anggaran dibawahnya.
 - c. SBKU yang menggunakan satuan selain layanan, menggunakan volume sesuai kebutuhan.
7. Untuk komponen/tahapan dalam pencapaian suatu Keluaran (output) pada SBKU dapat menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari:
 - a. perencanaan (*planning*);
 - b. pengorganisasian (*organizing*);
 - c. pelaksanaan (*actuating*); dan

d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan (*controlling*).

B. Standar Biaya Keluaran Umum

1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran

SBK layanan perencanaan dan penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk layanan perencanaan dan penganggaran untuk internal Kementerian/Lembaga hanya pada Biro Perencanaan atau unit yang menangani perencanaan dan penganggaran di tingkat Kementerian/Lembaga, termasuk di dalamnya layanan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran pada Kementerian/Lembaga tersebut.

2. SBK Layanan Pelatihan

SBK Layanan pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk layanan pelatihan yang diperuntukan bagi SDM aparatur internal K/L. SBK layanan pelatihan meliputi:

a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan

SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang terdiri dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan kategori 2 (dua). Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

Pelatihan dengan *blended learning* dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.

3. SBK Layanan Audit Internal

SBK layanan audit internal merupakan penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal, pelaksanaan audit, tindak lanjut audit, reuiu, pembinaan pengawasan kinerja dan penyusunan laporan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama

SBK Layanan Audit Internal dalam perkantoran yang sama merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi pada perkantoran yang sama dengan satuan kerja penyelenggara audit.

b. SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota

SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi dalam kota yang sama dengan satuan kerja penyelenggara audit.

c. SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi

SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi di provinsi yang berbeda dengan satuan kerja penyelenggara audit.

4. SBK Pemantauan dan Evaluasi

SBK Pemantauan dan Evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemantauan, penilaian serta pelaporan atas pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat pada Program Dukungan Manajemen.

b. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang digunakan oleh satker vertikal pada Program Dukungan Manajemen.

c. SBK Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

SBK Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan merujuk pada layanan pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemantauan, penilaian serta pelaporan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan pada Program Teknis dan Program Lintas.

5. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan yang berkaitan dengan: 1) Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan informasi; 2) Pengumpulan data dan informasi mengenai pendapat, sikap, dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah; 3) Publikasi dan dokumentasi kebijakan pemerintah; 4) Pelayanan

informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator

SBK layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

- b. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang digunakan oleh satker vertikal.

6. SBK Layanan Bantuan Hukum

SBK Layanan Bantuan Hukum merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang diberikan kepada Internal K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai

SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai merupakan SBK Layanan Bantuan Hukum yang diberikan kepada pegawai.

- b. SBK Layanan Bantuan Hukum Institusi

SBK Layanan Bantuan Hukum Institusi merupakan SBK Layanan Bantuan Hukum yang diberikan kepada institusi.

7. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)

SBK layanan BMN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan BMN untuk Satker Koordinator

SBK layanan BMN untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan BMN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

- b. SBK Layanan BMN untuk Satker Vertikal

SBK Layanan BMN untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan BMN yang digunakan oleh satker vertikal.

8. SBK Layanan Manajemen Kinerja

SBK Layanan Manajemen Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Layanan manajemen kinerja organisasi serta penyusunan laporan kinerja yang bersifat reguler/rutin. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat Eselon I/Setingkat.

b. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker vertikal.

9. SBK Layanan Manajemen Keuangan

SBK Layanan Manajemen Keuangan merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Layanan Manajemen Keuangan adalah layanan yang merujuk pada pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator

SBK layanan manajemen keuangan untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

b. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker vertikal.

10. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

SBK Layanan Manajemen SDM merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan pengelolaan SDM, meliputi perencanaan kebutuhan SDM dan karir, pengembangan sistem manajemen SDM, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga Tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/Lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT merupakan SBK Layanan Manajemen

SDM untuk pemanfaatan pada kementerian/lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT.

- b. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai s.d 3.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).

- c. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai 3.000 s.d 10.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).

- d. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai lebih dari 10.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).

Besaran alokasi pagu RO Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikelola oleh unit atau satuan kerja pengelola anggaran sumber daya manusia, dengan indeks Standar Biaya Keluaran Umum sebagaimana rincian diatas.

11. SBK Layanan Hukum

SBK Layanan Hukum merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan yang merujuk pada keluaran rangkaian kegiatan berupa koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan hanya pada Biro Hukum atau unit setingkat yang mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian/Lembaga.

12. SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal merujuk pada layanan yang berkaitan manajemen organisasi, kelembagaan dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga, hanya pada Biro Organisasi dan Tata Laksana atau unit setingkat yang mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, kelembagaan dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga.

13. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan yang berkaitan dengan kearsipan yaitu rekaman atau dokumentasi kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

b. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang digunakan oleh satker vertikal.

14. SBK Layanan Reformasi Kinerja

SBK Layanan Reformasi Kinerja merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi birokrasi dan penyusunan laporan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Reformasi Kinerja yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

b. SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Reformasi Kinerja yang digunakan oleh satker vertikal.

15. SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)

SBK RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Produk RSNI3 yang dihasilkan pada tahap penyusunan, pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat kementerian negara/lembaga. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.

- b. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi modifikasi yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi identik terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- d. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir berupa Produk RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

16. SBK Riset dan Inovasi

SBK Riset dan Inovasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk kegiatan riset dan inovasi. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. SBK ini meliputi persiapan, penyusunan, seleksi dan penetapan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penilaian keluaran/hasil atas suatu kegiatan riset dan inovasi. SBK riset dan inovasi terdiri dari:

a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual berupa hak cipta atau *copyright*, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), perlindungan varietas tanaman/ *PVT (plant variety protection)*/galur hewan yang dilepaskan, desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*), serta indikasi geografis. Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga.

b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa purwarupa. Purwarupa adalah hasil kegiatan riset dan inovasi yang dapat menjadi hasil akhir atau bagian dari hasil akhir sebagai proses pembuktian fungsi yang direncanakan, seperti material untuk produk biologi, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati penambah, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati baru, galur perbaikan, purwarupa laik industri, jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding, temuan senyawa/ *sequence* DNA penambah, temuan senyawa/ *sequence* DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati, jenis benih/ bibit/ varietas/ strain unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*, ekstrak temuan baru, alat kesehatan, test kit,

hasil uji produk yang dilakukan di Laboratorium yang sudah terstandarisasi, protokol uji klinis, dataset hasil riset dan inovasi, atau jenis/ bentuk rupa awal (pertama) dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga.

c. Model Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan *output* berupa Model. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif, peta jalan (*road map*), inovasi sosial tertentu, buku referensi, karya seni monumental, atau jenis/ bentuk lain dari Model dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga

d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi global. Publikasi bereputasi global adalah publikasi yang diterbitkan/ disebarluaskan dan terindeks global. Ketentuan terindeks global ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga.

e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi nasional. Publikasi bereputasi nasional adalah publikasi yang diterbitkan/ disebarluaskan dan terindeks nasional. Ketentuan terindeks secara nasional ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga

f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah kebijakan dari kegiatan riset terkait dengan hasil akhir berupa naskah kebijakan (Naskah Akademik, Naskah Urgensi, Monograf Kebijakan, Model Kebijakan, atau bentuk lain dari naskah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi). Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

17. SBK Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis

SBK Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rekomendasi Kebijakan Bidang tertentu yang merujuk pada kebijakan,

termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait bidang tertentu.

18. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh menteri/kepala badan/kepala lembaga berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian negara/lembaga berkenaan.

b. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian negara/lembaga berkenaan.

19. SBK Peraturan Presiden

SBK Peraturan Presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, termasuk di dalamnya rancangan peraturan presiden. Dalam hal SBK Peraturan Presiden diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Presiden. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Presiden yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Presiden yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

20. SBK Peraturan Pemerintah

SBK Peraturan Pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya rancangan peraturan presiden, dan tidak termasuk di dalamnya naskah akademis dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah. Dalam hal SBK Peraturan Pemerintah diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Pemerintah. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

21. SBK Rancangan Undang-Undang

SBK Rancangan Undang-Undang merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, termasuk di dalamnya Rancangan Undang-Undang, namun tidak termasuk Naskah Akademis dalam rangka penyusunan Undang-Undang. Dalam hal penyelesaian Rancangan Undang-Undang memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran, besaran SBK sebagaimana dimaksud merupakan akumulasi dari keseluruhan waktu pelaksanaan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tersebut. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana

SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

b. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks

SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

22. SBK Peraturan Lainnya

SBK Peraturan Lainnya merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian negara/lembaga

yang bersangkutan. Peraturan sejenis yang hanya mengikat ke dalam kementerian negara/lembaga tidak memerlukan alokasi anggaran tersendiri, dan apabila diperlukan biaya, dibebankan pada alokasi belanja operasional yang tersedia

23. SBK Sosialisasi dan Diseminasi

SBK Sosialisasi dan Diseminasi adalah besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan/atau diseminasi informasi secara luring (*offline*) kepada pihak-pihak terkait, dengan tujuan penyebarluasan informasi terkait suatu kebijakan atau arahan tertentu kepada masyarakat, lembaga maupun badan usaha dengan tujuan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menerima, dan mengaplikasikan informasi tersebut, dengan penerima manfaat *output* adalah eksternal K/L atau publik. Kegiatan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil kegiatan, dengan jumlah peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM
PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Negara/Lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (001)

Kode	No	Uraian
1	2	3
001.02		Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
5003.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	1	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya oleh Badan Pengkajian
	2	Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga
	3	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan
6487.AEB		Forum
	4	Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD
6487.BLA		Persidangan Lembaga Legislatif
	5	Sidang Paripurna MPR

2. Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat (002)

Kode	No	Uraian
1	2	3
002.02		Dewan
5801.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	1	Program Legislasi Nasional
5807.AEA		Koordinasi
	2	Koordinasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi

3. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

Kode	No	Uraian
1	2	3
004.01		Badan Pemeriksa Keuangan
1043.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara
	1	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada Ditjen PKN V
	2	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	3	Sumbangan IHPS Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	4	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	7	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN I
	8	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN II
	9	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN III
	10	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN IV
	11	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN V
	12	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VI
	13	Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VII
	14	Sumbangan IHPS Ditjen PKN I
	15	Sumbangan IHPS Ditjen PKN II
	16	Sumbangan IHPS Ditjen PKN III
	17	Sumbangan IHPS Ditjen PKN IV
	18	Sumbangan IHPS Ditjen PKN V
	19	Sumbangan IHPS Ditjen PKN VI
	20	Sumbangan IHPS Ditjen PKN VII
	21	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN I
	22	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN II
	23	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN III
	24	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN IV
	25	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN V
	26	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VI
	27	Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VII
	28	Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
	29	Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
	30	Kajian Bidang Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
	31	Kajian Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
	32	Kajian Bidang Manajemen Risiko
	33	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN I
	34	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN II
	35	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN III
	36	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN IV
	37	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN V
	38	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VI
	39	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VII
	40	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN I
	41	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada Ditjen PKN II
	42	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN III
	43	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN IV
	44	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN V

Kode	No	Uraian
1	2	3
	45	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VI
	46	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN I
	47	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN II
	48	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN III
	49	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN IV
	50	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN V
	51	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VI
	52	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VII
	53	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	54	Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen Pemeriksaan Investigasi
	55	LHP Ditjen PKN I
	56	LHP Ditjen PKN II
	57	LHP Ditjen PKN III
	58	LHP Ditjen PKN IV
	59	LHP Ditjen PKN V
	60	LHP Ditjen PKN VI
	61	LHP Ditjen PKN VII
	62	LHP BPK Perwakilan Aceh
	63	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
	64	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau
	65	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
	66	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi
	67	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
	68	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
	69	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung
	70	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
	71	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	72	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten
	73	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	74	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
	75	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
	76	LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
	77	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
	78	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali
	79	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
	80	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	81	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
	82	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
	83	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
	84	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
	85	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
	86	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
	87	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
	88	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
	89	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
	90	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
	91	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku
	92	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
	93	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua
	94	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
	95	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Kode	No	Uraian
1	2	3
	96	LHP LKPP
	97	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah
	98	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan
	99	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan
	100	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya
	101	LHP Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional
	102	LHP Tematik Ditjen PKN I
	103	LHP Tematik Ditjen PKN II
	104	LHP Tematik Ditjen PKN III
	105	LHP Tematik Ditjen PKN IV
	106	LHP Tematik Ditjen PKN V
	107	LHP Tematik Ditjen PKN VI
	108	LHP Tematik Ditjen PKN VII
	109	LHP Investigasi
	110	Laporan Penelaahan Informasi Awal
	111	Laporan Pemberian Keterangan Ahli
1153.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara
	112	Laporan Hasil Reviu Inspektorat
	113	Laporan Hasil Pertimbangan Inspektorat
	114	Layanan Manajemen Internal Inspektorat PIMK
	115	Layanan Manajemen Internal Inspektorat PKMP
	116	Layanan Manajemen Internal Inspektorat Penegakan Integritas
1167.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara
	117	Kurikulum dan Silabus Diklat
	118	Bahan Ajar Diklat
	119	Layanan Manajemen Internal Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran
	120	Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa
	121	Perencanaan Diklat
	122	Layanan Manajemen Internal Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat
	123	Layanan Manajemen Internal Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat
6830.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara
	124	Layanan Manajemen Internal Pusat LPBH
	125	Layanan Manajemen Internal Pusat KHKKN
6831.FAF		Pemeriksaan Keuangan Negara
	126	Layanan Manajemen Internal Pusat PSMK
	127	Layanan Manajemen Internal Pusat Analisis Kebijakan PKN
	128	Layanan Manajemen Internal Pusat EPP
6832.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	129	Layanan Manajemen Internal Biro Humas
	130	Layanan Manajemen Internal Biro SDM
	131	Layanan Manajemen Internal Biro Keuangan
	132	Layanan Manajemen Internal Biro Umum
	133	Layanan Manajemen Internal Biro Sekretariat Pimpinan
	134	Layanan Manajemen Internal Biro Teknologi Informasi
	135	Layanan Manajemen Internal Biro Ortala

4. Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

Kode	No	Uraian
1	2	3
005.02		Kepaniteraan
1044.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	1	Putusan Perkara Pidana
	2	Putusan Perkara Pidana Militer
	3	Penyesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt
005.03		Ditjen Badan Peradilan Umum
1049.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	4	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat
	5	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat
	6	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat
	7	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat
	8	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat
	9	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah
	10	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah
	11	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah
	12	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah
	13	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah
	14	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur
	15	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Timur
	16	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur
	17	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur
	18	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur
005.04		Ditjen Badan Peradilan Agama
1053.AEA		Koordinasi
	19	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat
	20	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah
	21	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur
1053.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	22	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
005.05		Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Tun)
1058.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	23	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama
	24	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer
	25	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua
	26	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer Wilayah Papua
	27	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer
1059.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	28	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

5. Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Agung (006)

Kode	No	Uraian
1	2	3
006.01		Kejaksaan Republik Indonesia
1097.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	1	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri
	2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri
1100.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	3	Kegiatan Produksi Intelijen
1102.AEG		Konferensi dan Event
	4	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
1102.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	5	Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO
	6	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
	7	Operasi Intelijen melalui Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
	8	Operasi Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
1102.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	9	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
1102.FAG		Pengawasan Pembangunan
	10	Pengawasan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
1103.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	11	Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
6581.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
	12	Layanan Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6581.BCE		Penanganan Perkara
	13	Perkara Perdata yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
	14	Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	15	Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6582.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	16	Layanan Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
6582.BCE		Penanganan Perkara
	17	Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	18	Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
	19	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
	20	Layanan Penyelidikan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
	21	Layanan Penyidikan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
	22	Layanan Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
	23	Layanan Eksekusi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
	24	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A
	25	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori B
	26	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori C

Kode	No	Uraian
1	2	3
	27	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori D
	28	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A
	29	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori B
	30	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori C
	31	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori D
	32	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 1
	33	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 2 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi darat
	34	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 3 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi darat
	35	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 4 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi laut
	36	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Wilayah 5 jauh dengan Kejaksaan Negeri dengan transportasi udara
	37	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 1A Satker dekat dari Pengadilan Tipikor
	38	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 1B Satker dekat dari Pengadilan Tipikor
	39	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap
	40	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap
	41	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	42	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	43	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	44	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	45	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3E Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	46	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3F Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	47	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3G Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	48	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3H Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap
	49	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap

Kode	No	Uraian
1	2	3
	50	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
	51	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
	52	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap
	53	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
	54	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
	55	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
	56	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap
	57	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 1A Satker dekat dari LP
	58	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 1B Satker dekat dari LP
	59	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 2A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat
	60	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 3A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat
	61	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 3B Satker jauh dari LP dengan transportasi darat
	62	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 4A Satker jauh dari LP dengan transportasi laut
	63	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 4B Satker jauh dari LP dengan transportasi laut
	64	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 5A Satker jauh dari LP dengan transportasi udara
	65	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 5B Satker jauh dari LP dengan transportasi udara
	66	Layanan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan

6. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara (007)

Kode	No	Uraian
1	2	3
007.01		Sekretariat Negara
1126.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	1	Layanan Manajemen Ketatalaksanaan
1148.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	2	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
5958.ABN		Kebijakan Bidang Sosial
	3	Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
5959.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	4	Analisis Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan
6430.ABM		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
	5	Analisis Pengaduan Masyarakat
	6	Analisis Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
	7	Analisis Hubungan Lembaga Non Pemerintah
	8	Analisis Bahan Kebijakan
6431.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
	9	Analisis RPUU Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	10	Analisis RPUU Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
	11	Analisis RPUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	12	Analisis RPUU Bidang Perekonomian
	13	Analisis dan administrasi penyelesaian hukum dan PUU
6432.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	14	Layanan Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya
6433.BEI		Bantuan Lembaga
	15	Pemberian Bantuan Pemerintah
6433.FAA		Kearsipan
	16	Layanan Kearsipan Kepresidenan
6434.AAE		Keputusan Presiden
	17	Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian Personel TNI dan Polri
	18	Rancangan Keputusan Presiden tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6434.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	19	Layanan Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
007.06		Pasukan Pengamanan Presiden
5965.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	20	Operasi Pengamanan Kediaman Presiden, Wakil Presiden dan Keluarganya serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden
007.07		Dewan Pertimbangan Presiden
5966.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	21	Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan
007.10		Kantor Staf Presiden
5969.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	22	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional

7. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri RI (010)

Kode	No	Uraian
1	2	3
010.01		Sekretariat Jenderal
6086.ADG		Standarisasi Profesi dan SDM
	1	Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri
	2	Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri
	3	Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri
010.09		Ditjen Bina Keuangan Daerah
6141.BMA		Data dan Informasi Publik
	4	Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	5	Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	6	Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
010.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1285.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	7	Aparatur yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
6144.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	8	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional
	9	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi
	10	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi
	11	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
	12	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Manajemen Kepemimpinan
	13	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Fungsional dan Teknis
	14	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 hari Bidang Fungsional dan Teknis
	15	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 14 hari Bidang Fungsional dan Teknis

8. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Luar Negeri RI (011)

Kode	No	Uraian
1	2	3
011.07		Ditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional
6030.AEC		Kerja sama
	1	Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Ekonomi
011.08		Ditjen Protokol Dan Konsuler
6029.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
	2	Pelayanan Fasilitas Diplomatik
011.11		Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
6027.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	3	Rekomendasi Strategi Kebijakan Multilateral
	4	Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
	5	Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

9. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

Kode	No	Uraian
1	2	3
012.01		Kementerian Pertahanan
1386.DBA		Pendidikan Tinggi
	1	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Prajurit Kadet
	2	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Kopral Kadet
	3	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Kadet
	4	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Dua Kadet
	5	Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Satu Kadet
	6	Prodi Sarjana Farmasi Prajurit Kadet
	7	Prodi Sarjana Farmasi Kopral Kadet
	8	Prodi Sarjana Farmasi Sersan Kadet
	9	Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Dua Kadet
	10	Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Satu Kadet
	11	Prodi Sarjana Matematika Prajurit Kadet
	12	Prodi Sarjana Matematika Kopral Kadet
	13	Prodi Sarjana Matematika Sersan Kadet
	14	Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Dua Kadet
	15	Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Satu Kadet
	16	Prodi Sarjana Biologi Prajurit Kadet
	17	Prodi Sarjana Biologi Kopral Kadet
	18	Prodi Sarjana Biologi Sersan Kadet
	19	Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Dua Kadet
	20	Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Satu Kadet
	21	Prodi Sarjana Fisika Prajurit Kadet
	22	Prodi Sarjana Fisika Kopral Kadet
	23	Prodi Sarjana Fisika Sersan Kadet
	24	Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Dua Kadet
	25	Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Satu Kadet
	26	Prodi Sarjana Kimia Prajurit Kadet
	27	Prodi Sarjana Kimia Kopral Kadet
	28	Prodi Sarjana Kimia Sersan Kadet
	29	Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Dua Kadet
	30	Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Satu Kadet
	31	Prodi Sarjana Teknik Informatika Prajurit Kadet
	32	Prodi Sarjana Teknik Informatika Kopral Kadet
	33	Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Kadet
	34	Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Mayor Dua Kadet
	35	Prodi Sarjana teknik Informatika Sersan Mayor Satu Kadet
	36	Prodi Sarjana Teknik Sipil Prajurit Kadet
	37	Prodi Sarjana Teknik Sipil Kopral Kadet
	38	Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Kadet
	39	Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Dua Kadet
	40	Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Satu Kadet
	41	Prodi Sarjana Teknik Elektro Prajurit Kadet
	42	Prodi Sarjana Teknik Elektro Kopral Kadet
	43	Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Kadet
	44	Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Dua Kadet
	45	Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Satu Kadet
	46	Prodi Sarjana Teknik Mesin Prajurit Kadet
	47	Prodi Sarjana Teknik Mesin Kopral Kadet
	48	Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Kadet
	49	Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Dua Kadet

Kode	No	Uraian
1	2	3
	50	Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Satu Kadet
	51	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru S-1
6549.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	52	Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)
6549.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	53	Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)
6549.BCB		Perkara Hukum Lembaga
	54	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 1
	55	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 2
	56	Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1
	57	Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2
	58	Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4
	59	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 1
	60	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 2
	61	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1
6551.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	62	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1
	63	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2
	64	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris
	65	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 1
	66	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 2
	67	Kursus Intensif Bahasa Arab
	68	Kursus Intensif Bahasa Jepang
	69	Kursus Intensif Bahasa Jerman
	70	Kursus Intensif Bahasa Korea
	71	Kursus Intensif Bahasa Mandarin
	72	Kursus Intensif Bahasa Prancis
	73	Kursus Intensif Bahasa Rusia
	74	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan
	75	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan
	76	Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan
	77	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda
	78	Kursus Dasar Manajemen Pertahanan
	79	Kursus Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pertahanan
	80	Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan
	81	Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama
	82	Pelatihan <i>Cyber Defence</i>
	83	Pelatihan Administrasi Umum
	84	Pelatihan Alih Golongan Bagi PNS
	85	Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat bagi Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan 2 Gelombang
	86	Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat (Gabungan Ormas) 2 Gelombang
6554.DCG		Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
	87	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I
	88	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II
	89	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III
	90	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV
	91	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V
	92	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I
	93	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II

Kode	No	Uraian
1	2	3
	94	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III
	95	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV
	96	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V
	97	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I
	98	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II
	99	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III
	100	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV
	101	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V
012.21		Markas Besar TNI
6527.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	102	Forum Komuniti Hukum
6530.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	103	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1
	104	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2
	105	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3
	106	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4
	107	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5
	108	Petunjuk Pembinaan Napi Prajurit
6530.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Luar Kota
	110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum TK. I Luar Kota
	111	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1
	112	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2
	113	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3
	114	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4
	115	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5
	116	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1
	117	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2
	118	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3
	119	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4
	120	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5
	121	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer
	122	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1
	123	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2
	124	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3
	125	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4
	126	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5
	127	Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer
	128	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1
	129	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2
	130	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3
	131	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4
	132	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5
	133	Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana
	134	Lelang Sita Rampasan
	135	Eksekusi Orang/Barang
	136	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I
	137	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding
	138	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi
	139	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK
	140	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I
	141	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
	142	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi

Kode	No	Uraian
1	2	3
	143	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
	144	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I
	145	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding
	146	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi
	147	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK
	148	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I
	149	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding
	150	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi
	151	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK
	152	Bantuan dan Nasihat Hukum Non Litigasi
	153	Pendapat dan Saran Hukum
	154	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit
	155	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit
	156	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana
	157	Pengolahan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas
	158	Harmonisasi Perpang TNI
	159	Pengawasan Teknis Penyelesaian Perkara
	160	Pengamanan Barang Bukti
	161	Penelusuran Asset Perkara Pidana
	162	Asistensi Penyelesaian Perkara
	163	Eksaminasi Perkara
	164	Sertifikasi Oditur Militer
	165	Pengurusan Tahanan Sementara
	166	Penyidikan Perkara Koneksitas
	167	Penyidikan Perkara di Luar Negeri
6537.BHA		Operasi Bidang Pertahanan
	168	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI
	169	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon I
	170	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon II
	171	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon III
	172	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon IV
	173	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah)
	174	Rahwan Rayon I
	175	Rahwan Rayon II
	176	Rahwan Rayon III
	177	Rahwan Rayon IV
	178	Rahwan Rayon V (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah)
	179	Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL
	180	Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL
	181	Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL YONIF RK 114/SM, DAM IM ACEH
	182	Pembentukan 5 Satgas UNIFIL
	183	Kegiatan Gabungan 5 Satgas UNIFIL
	184	Kegiatan Satgas MPU UNIFIL
	185	Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL
	186	Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL
	187	Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL
	188	Kegiatan Satgas Level II Hospital UNIFIL
	189	Gabungan Gelar Siap dan Rotasi 5 Satgas UNIFIL
	190	Gabungan Purna Tugas 5 Satgas UNIFIL
	191	Pembentukan Satgas MTF
	192	Kegiatan Satgas MTF

Kode	No	Uraian
1	2	3
	193	Purna Tugas Satgas MTF
	194	Pembentukan Satgas Yon RDB MONUSCO
	195	Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO
	196	Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO
	197	Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO YONZIKON 1/DD, MEDAN SUMATRA UTARA
	198	Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO
	199	Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO
	200	Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO
	201	Pembentukan Satgas Kizi Minusca Car YONZIPUR 10/JP/2/, KOSTRAD PROBOLINGGO, JATIM
	202	Kegiatan Satgas Minusca Car
	203	Purna Tugas Satgas Kizi Minusca Car
	204	Pembentukan Military Expert On Mission
	205	Kegiatan Military Expert On Mission
	206	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I
	207	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II
	208	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III
	209	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I
	210	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II
	211	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III
	212	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV
	213	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V
	214	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I
	215	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II
	216	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III
	217	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV
	218	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V
	219	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Terpusat
	220	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon I
	221	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon II
	222	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon III
	223	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon IV
	224	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon V
	225	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I
	226	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II
	227	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III
	228	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV
	229	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V
	230	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I
	231	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II
	232	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III
	233	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV
	234	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V
	235	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter
	236	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI
	237	Peserta Operasi Siber TNI
	238	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV
	239	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V
	240	Penggelaran Satgas Operasi Penerangan TNI
	241	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Papua Selatan)
	242	Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Papua Pagunungan)
	243	Rahwan Rayon V (Papua Selatan)

Kode	No	Uraian
1	2	3
	244	Rahwan Rayon V (Papua Pegunungan)
	245	PEMBENTUKAN SATGAS TONZIHOR UNIFIL
	246	LATPRATUGAS TONZIHOR UNIFIL
	247	PURNA TUGAS TONZIHOR UNIFIL
6537.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	248	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I
	249	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II
	250	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III
	251	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV
	252	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V
6538.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	253	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PK TNI
	254	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pnb TNI
	255	Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI
	256	Penerimaan CPNS UO Mabes TNI
	257	Diklat Alih PNS
	258	Pendidikan Dasar (Diksar) Integratif Capratar Akademi TNI
	259	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Taruna/Taruni Akademi TNI
	260	Kursus Perwira Panitera TNI
	261	Pendidikan Pertama Pa PSDP Pnb TNI
	262	Pendidikan Lanjutan Pa PSDP PNB TNI
	263	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI
	264	Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI
	265	Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI
	266	Lulusan Sesko TNI
	267	Kursus Perwira Penerangan TNI
	268	Kursus Tenaga Pendidik TNI
	269	Pendidikan Pengembangan Khusus/Spesialisasi Perwira
	270	Pendidikan Pengembangan Khusus/Spesialisasi Bintara
	271	Pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang TNI
	272	Kursus Jabatan Hakim Militer TNI
	273	Kursus Jabatan Oditor Militer TNI
	274	Kursus Tenaga Inti Pembinaan Mental TNI
	275	Pendidikan SAR TNI
	276	Pendidikan Susjemen Penanggulangan Bencana TNI
	277	Kursus Dasar Perwira Intelijen
	278	Kursus Perwira Kontra Intelijen
	279	Kursus Perwira Intelijen Strategis
	280	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen
	281	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen
	282	Kursus Dasar Bintara Intelijen
	283	Kursus Perwira Intelijen Siber
	284	Kursus Bintara Intelijen Siber
	285	Kursus Perwira Intelijen Medis
	286	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi
	287	Pembekalan Intelijen
	288	Kursus Perwira Interogator
	289	Kursus Bintara Interogator
	290	Seleksi Asisten Atase Pertahanan RI
	291	Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI
	292	Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI
	293	Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI
	294	Seleksi Atase Pertahanan RI

Kode	No	Uraian
1	2	3
	295	Seleksi Kursus Perwira Intelijen
	296	Seleksi Kursus Bintara Intelijen
	297	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes
	298	Penataran/Latihan PA Bangspes
	299	Penataran/Latihan BA Bangspes
	300	Penataran/Latihan TA Bangspes
	301	Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMAI)
	302	Kursus Perwira Intelijen Teknik
	303	Kursus Bintara Intelijen Teknik
	304	Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI
	305	Kursus Perwira Penggalangan
	306	Kursus Perwira PCI
	307	Kursus Perwira Litpers
	308	Kursus Atase Pertahanan RI
	309	Penataran Istri Atase Pertahanan RI
	310	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial
	311	Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial
	312	Pendidikan Sekbang Terpadu TNI
	313	Kursus Sandi Atase Pertahanan RI
	314	Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI
	315	Kursus Asisten Atase Pertahanan RI
	316	Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI
	317	Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI
	318	Kursus Komputer Atase Pertahanan RI
	319	Pendidikan Suspa Cyber TNI
	320	Seleksi Sus Jab Oditor Militer
	321	Seleksi Sus Jab Hakim Militer
	322	Pendidikan Susjemen Pengadaan Barang/Jasa TNI
	323	Pendidikan Susjemen Auditor Ahli Pertama TNI
	324	Pendidikan Susjemen Rengar TNI
	325	Kursus Perwira Administrasi Keuangan
	326	Pendidikan Sistem Pertahanan Udara Nasional TNI
	327	Kursus Perwira Perang Elektronika Pertahanan Udara
	328	Kursus Perwira Pertahanan Udara Pasif
	329	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Panselinda Khusus Pria TNI
	330	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Panselinda Khusus Wanita TNI
	331	Pendidikan Pertama Pa PSDP Pertanian Pria TNI
	332	Pendidikan Pertama Pa PSDP Pertanian Wanita TNI
	333	Pendidikan Pertama Siber Pria TNI
	334	Pendidikan Pertama Siber Wanita TNI
	335	Pendidikan Kursus Dasar Operator Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) TNI
	336	Pendidikan Kursus Perwira Sejarah TNI
	337	Pendidikan Kursus Perwira Administrasi Pemilah Perkara TNI
6539.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	338	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri
	339	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri
	340	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I
	341	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II
	342	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III
	343	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV
	344	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V
	345	Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI
	346	Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI

Kode	No	Uraian
1	2	3
	347	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah I)
	348	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah II)
	349	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah III)
	350	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV)
	351	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Maluku, Maluku Utara , Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,Papua Tengah)
	352	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah I)
	353	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)
	354	Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel
	355	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Papua Selatan)
	356	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Papua Pegunungan)
	357	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah III)
	358	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah IV)
	359	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Maluku, Maluku Utara , Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,Papua Tengah)
	360	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Papua Selatan)
	361	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Papua Pegunungan)
012.22		Markas Besar TNI AD
1466.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	362	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
	363	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
	364	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
	365	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
	366	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)
	367	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)
	368	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)
	369	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)
	370	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)
	371	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)
	372	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)
	373	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)
	374	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)
	375	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)
	376	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)
	377	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)
	378	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)
	379	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)
	380	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)
	381	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)
	382	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
	383	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
	384	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
	385	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
	386	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)
	387	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)
	388	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)
	389	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)
	390	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)
	391	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)
	392	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)
	393	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)
	394	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)
	395	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)

Kode	No	Uraian
1	2	3
	396	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Intel)
	397	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	398	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	399	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	400	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	401	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	402	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	403	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	404	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	405	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	406	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter)
	407	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
	408	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
	409	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
	410	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
	411	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel)
6501.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	412	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I
	413	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II
	414	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III
	415	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV
	416	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V
	417	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding
	418	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi
	419	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK
	420	Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)
	421	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I
	422	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II
	423	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III
	424	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV
	425	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V
	426	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
	427	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
	428	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
	429	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I
	430	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II
	431	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III
	432	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV
	433	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V
	434	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I
	435	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II
	436	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III
	437	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV

Kode	No	Uraian
1	2	3
	438	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V
	439	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I
	440	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II
	441	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III
	442	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV
	443	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V
	444	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I
	445	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II
	446	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III
	447	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV
	448	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V
	449	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I
	450	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II
	451	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III
	452	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV
	453	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V
	454	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I
	455	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II
	456	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III
	457	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV
	458	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V
	459	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I
	460	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II
	461	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III
	462	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV
	463	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V
	464	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I
	465	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II
	466	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III
	467	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV
	468	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V
	469	Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)
	470	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon I
	471	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon II
	472	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon III
	473	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon IV
	474	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon V
6501.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	475	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I
	476	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II
	477	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III
	478	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV
	479	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V
	480	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I
	481	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II
	482	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III
	483	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV
	484	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V
	485	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I

Kode	No	Uraian
1	2	3
	486	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II
	487	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III
	488	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV
	489	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V
	490	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I
	491	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II
	492	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III
	493	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV
	494	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V
	495	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I
	496	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II
	497	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III
	498	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV
	499	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V
	500	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon I
	501	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon II
	502	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon III
	503	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon IV
	504	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V
	505	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I
	506	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon II
	507	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon III
	508	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon IV
	509	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon V
	510	Pengawalan Polisi Militer Rayon I
	511	Pengawalan Polisi Militer Rayon II
	512	Pengawalan Polisi Militer Rayon III
	513	Pengawalan Polisi Militer Rayon IV
	514	Pengawalan Polisi Militer Rayon V
6501.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	515	Bankum Non Litigasi Penyuluhan Hukum
	516	Bankum Non Litigasi Pembekalan Hukum
	517	Perjanjian Kerjasama
	518	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-Undangan
6505.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	519	Koptar Pria
	520	Koptar Wanita
	521	Sersan Taruna Pria
	522	Sersan Taruna Wanita
	523	Sermadatar Pria
	524	Sermadatar Wanita
	525	Sermatar Pria
	526	Sermatar Wanita
	527	Dikmaba Pria Rayon I
	528	Dikmaba Pria Rayon II
	529	Dikmaba Pria Rayon III
	530	Dikmaba Pria Rayon IV
	531	Dikmaba Pria Rayon V
	532	Dikmaba Wanita
	533	Dikmata Rayon I
	534	Dikmata Rayon II
	535	Dikmata Rayon III
	536	Dikmata Rayon IV

Kode	No	Uraian
1	2	3
	537	Dikmata Rayon V
	538	Werving Taruna Matra Darat
	539	Werving Bintara Umum Matra Darat
	540	Werving Tamtama Matra Darat Umum
	541	Diktukpa Reg/Sus
	542	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon I
	543	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon II
	544	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon III
	545	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon IV
	546	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon V
	547	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I
	548	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II
	549	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III
	550	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV
	551	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V
	552	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I
	553	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II
	554	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III
	555	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV
	556	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V
	557	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I
	558	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II
	559	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III
	560	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV
	561	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V
	562	Pendidikan Seskoad
	563	Diklapa I Cab Satpur/Banpur
	564	Diklapa I Cab Banmin
	565	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I
	566	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II
	567	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III
	568	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV
	569	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V
	570	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I
	571	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II
	572	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III
	573	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV
	574	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V
	575	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
	576	Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur
	577	Dikbangspespa Cab Banmin
	578	Dikcab Perwira Satpur/Banpur
	579	Dikcab Perwira Banmin
	580	Dikbangspesba Rayon I
	581	Dikbangspesba Rayon II
	582	Dikbangspesba Rayon III
	583	Dikbangspesba Rayon IV
	584	Dikbangspesba Rayon V
	585	Dikjur Bintara Rayon I
	586	Dikjur Bintara Rayon II
	587	Dikjur Bintara Rayon III
	588	Dikjur Bintara Rayon IV
	589	Dikjur Bintara Rayon V

Kode	No	Uraian
1	2	3
	590	Diklatnis PNS
	591	Dikbangspesta Rayon I
	592	Dikbangspesta Rayon II
	593	Dikbangspesta Rayon III
	594	Dikbangspesta Rayon IV
	595	Dikbangspesta Rayon V
	596	Dikjur Tamtama Rayon I
	597	Dikjur Tamtama Rayon II
	598	Dikjur Tamtama Rayon III
	599	Dikjur Tamtama Rayon IV
	600	Dikjur Tamtama Rayon V
	601	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I
	602	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II
	603	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III
	604	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV
	605	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V
	606	Pendidikan Keahlian Rayon I
	607	Pendidikan Keahlian Rayon II
	608	Pendidikan Keahlian Rayon III
	609	Pendidikan Keahlian Rayon IV
	610	Pendidikan Keahlian Rayon V
	611	Pendidikan Komando dan Gultor
	612	Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus
	613	Dik Iptek S-1
	614	Dik Iptek D-3 Rayon I
	615	Dik Iptek D-3 Rayon II
	616	Dik Iptek D-3 Rayon III
	617	Dik Iptek D-3 Rayon IV
	618	Dik Iptek D-3 Rayon V
	619	Dik Iptek SMK Rayon I
	620	Dik Iptek SMK Rayon II
	621	Dik Iptek SMK Rayon III
	622	Dik Iptek SMK Rayon IV
	623	Dik Iptek SMK Rayon V
	624	Dik Iptek D4 Matra Darat
	625	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I
	626	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II
	627	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III
	628	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV
	629	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V
	630	Diklapa II Cab Satpur/Banpur
	631	Diklapa II Cab Banmin
	632	Latsar CPNS
	633	Pratar Pria
	634	Pratar Wanita
012.23		Markas Besar TNI AL
1506.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	635	Latihan Kematraan Rayon I
	636	Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon I
	637	Latihan Satuan Rayon I
	638	Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri
	639	Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon I
	640	Latihan Perorangan Marinir Rayon I

Kode	No	Uraian
1	2	3
	641	Latihan Satuan Marinir Rayon I
	642	Latihan Perorangan Taifib-Denjaka Rayon I
	643	Latihan Satuan Taifib-Denjaka Rayon I
	644	Latihan Kematraan Rayon II
	645	Latihan Kematraan Rayon III
	646	Latihan Intelejen TNI AL RAYON I
	647	Latihan Kematraan Rayon IV
	648	Latihan Kematraan Rayon V
	649	Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon II
	650	Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon III
	651	Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon IV
	652	Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon V
	653	Latihan Satuan Rayon II
	654	Latihan Satuan Rayon III
	655	Latihan Satuan Rayon IV
	656	Latihan Satuan Rayon V
	657	Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon II
	658	Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon III
	659	Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon IV
	660	Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon V
	661	Latihan Satuan Marinir Rayon II
	662	Latihan Satuan Marinir Rayon III
	663	Latihan Satuan Marinir Rayon IV
	664	Latihan Satuan Marinir Rayon V
	665	Latihan Satuan Taifib-Denjaka Rayon V
	666	Latihan Perorangan Taifib-Denjaka V
	667	Latihan Perorangan Marinir Rayon II
	668	Latihan Perorangan Marinir Rayon III
	669	Latihan Perorangan Marinir Rayon IV
	670	Latihan Perorangan Marinir Rayon V
	671	Latihan Intelijen TNI AL Rayon II
	672	Latihan Intelijen TNI AL Rayon III
	673	Latihan Intelijen TNI AL Rayon IV
	674	Latihan Intelijen TNI AL Rayon V
6525.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	675	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1
	676	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2
	677	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3
	678	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4
	679	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5
	680	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1
	681	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2
	682	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3
	683	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4
	684	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5
	685	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1
	686	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2
	687	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3
	688	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4
	689	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5
	690	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1
	691	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2
	692	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3

Kode	No	Uraian
1	2	3
	693	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4
	694	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5
	695	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1
	696	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2
	697	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3
	698	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3
	699	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5
	700	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1
	701	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2
	702	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3
	703	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4
	704	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5
	705	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1
	706	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2
	707	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3
	708	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4
	709	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5
6525.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	710	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut
	711	Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut
	712	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1
	713	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2
	714	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3
	715	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4
	716	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5
	717	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding
	718	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi
	719	Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK
	720	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer
	721	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1
	722	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2
	723	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3
	724	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4
	725	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5
	726	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
	727	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
	728	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
	729	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum
	730	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1
	731	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2
	732	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3
	733	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4
	734	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5
	735	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1
	736	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2
	737	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3
	738	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4
	739	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5
	740	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1
	741	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2
	742	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3
	743	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4
	744	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5

Kode	No	Uraian
1	2	3
	745	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1
	746	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2
	747	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3
	748	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4
	749	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5
	750	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1
	751	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2
	752	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3
	753	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4
	754	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5
	755	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1
	756	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2
	757	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3
	758	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4
	759	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5
	760	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1
	761	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2
	762	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3
	763	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4
	764	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5
	765	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1
	766	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2
	767	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3
	768	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4
	769	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5
	770	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1
	771	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2
	772	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3
	773	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4
	774	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5
	775	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat
	776	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat
6557.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	777	Werving Calon Bintara Matra Laut
	778	Werving Calon Tamtama Matra Laut
	779	Peserta Diklapa
	780	Peserta Diktukpa Reguler dan Singkat
	781	Peserta Diktukba Reguler dan Singkat
	782	Peserta Kursus Manajemen Strategik
	783	Peserta Seskoal
	784	Seleksi Dik D-3 STTAL dan Kesehatan
	785	Seleksi Dik S-1 STTAL
	786	Seleksi Dik S-2 STTAL
	787	Peserta Dikspespa
	788	Peserta Dikspesba
	789	Peserta Dik Brevet
	790	Peserta Penerbang TNI AL
	791	DIKMA KOPTAR PRIA
	792	Dik D-3 Kodiklatal
	793	DIKMA SERTAR PRIA
	794	Pendidikan Dasar Lanjutan Vokasi (Pria)
	795	Pendidikan Dasar Lanjutan Vokasi (Wanita)
	796	DIKMA SERMATAR Pria

Kode	No	Uraian
1	2	3
	797	DIKMA SERMATAR Wanita
	798	Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut
	799	Dikma Bintara Pria Matra Laut
	800	Diksargolan Bintara Matra Laut
	801	Dikma Tamtama Matra Laut
	802	Diksargolan Tamtama Matra Laut
	803	Dik Seskoal
	804	Diklapa Matra Laut
	805	Diktukpa Matra Laut
	806	Diktukba Matra Laut
	807	Dikbangsus Perwira Matra Laut
	808	Dikbangsus Bintara Matra Laut
	809	Dikbangsus Tamtama Matra Laut
	810	Diksus Manajemen Strategik Matra Laut
	811	Diksus Penerbang Matra Laut
	812	Diksus Brevet Matra Laut
	813	Dik STTAL D-3
	814	Dik STTAL S-1
	815	Dik S-2 STTAL
	816	Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban
	817	Diksargolan Bintara Matra Laut di Tanjung Uban
	818	Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban
	819	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban
	820	Dikma Bintara Matra Laut di Makassar
	821	Diksargolan Bintara Matra Laut di Makassar
	822	Dikma Tamtama Matra Laut di Makassar
	823	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Makassar
	824	Dikma Bintara Matra Laut di Sorong
	825	Diksargolan Bintara Matra Laut di Sorong
	826	Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong
	827	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Sorong
	828	Peserta Dikspesta
	829	Dikma Bintara Matra Laut Di Manado
	830	Diksargolan Bintara Matra Laut di Manado
	831	Dikma Tamtama Matra Laut di Manado
	832	Diksargolan Tamtama Matra Laut di Manado
	833	Peserta Lemhanas
	834	Peserta Sesko TNI (TNI AL)
	835	Peserta Sus PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut)
	836	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
	837	DIKMA PRATAR PRIA
012.24		Markas Besar TNI AU
1536.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	838	Peserta Latihan Kematraan Rayon I
	839	Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri
	840	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri
	841	Peserta Latihan Kematraan Rayon 2
	842	Peserta Latihan Kematraan Rayon 3
	843	Peserta Latihan Kematraan Rayon 4
	844	Peserta Latihan Kematraan Rayon 5
1537.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	845	Werving Bintara Matra Udara
	846	Werving Tamtama Matra Udara

Kode	No	Uraian
1	2	3
	847	Peserta Seskoau dan Sessau Matra Udara
	848	Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara
	849	Peserta Setukpa Matra Udara
	850	Peserta Setukba Matra Udara
	851	Sertar Pria
	852	Sertar Wanita
	853	Pendidikan Sermatar Pria
	854	Pendidikan Sermatar Wanita
	855	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara
	856	Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara
	857	Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara
	858	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD
	859	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD
	860	Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara
	861	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara
	862	Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara
	863	Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara Lanjutan
	864	Pendidikan SIP/SIN Matra Udara
	865	Pendidikan Seskoau
	866	Pendidikan Sessau
	867	Pendidikan Sekkau
	868	Pendidikan Suspajemen
	869	Pendidikan Setukpa
	870	Pendidikan Setukba
	871	Dikbangspes Perwira Matra Udara
	872	Dikbangspes Bintara Matra Udara
	873	Dikbangspes Tamtama Matra Udara
	874	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara
	875	Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara
	876	Koptar Pria
	877	Koptar Wanita
	878	Prajurit Taruna Pria
	879	Prajurit Taruna Wanita
6544.BCA		Perkara Hukum Perseorangan
	880	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1
	881	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2
	882	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3
	883	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4
	884	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5
	885	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1
	886	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2
	887	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3
	888	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4
	889	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5
	890	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1
	891	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2
	892	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3
	893	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4
	894	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5
	895	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1
	896	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2
	897	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3
	898	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4

Kode	No	Uraian
1	2	3
	899	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5
	900	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 1
	901	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 2
	902	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 3
	903	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 4
	904	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 5
	905	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Banding
	906	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Kasasi
	907	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. PK
	908	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1
	909	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2
	910	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3
	911	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4
	912	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5
	913	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding
	914	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi
	915	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK
	916	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 1
	917	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 2
	918	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 3
	919	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 4
	920	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 5
	921	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 1
	922	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 2
	923	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 3
	924	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 4
	925	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 5
	926	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1
	927	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2
	928	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3
	929	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4
	930	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5
	931	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1
	932	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2
	933	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3
	934	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4
	935	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5
	936	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1
	937	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2
	938	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3
	939	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4
	940	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5
	941	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1
	942	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2
	943	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3
	944	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4

Kode	No	Uraian
1	2	3
	945	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5
	946	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1
	947	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2
	948	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3
	949	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4
	950	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5
	951	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1
	952	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2
	953	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3
	954	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4
	955	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5
	956	Pendapat dan Saran Hukum (PSH)
	957	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1
	958	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2
	959	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3
	960	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4
	961	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5
	962	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1
	963	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2
	964	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3
	965	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4
	966	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5
	967	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1
	968	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2
	969	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3
	970	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4
	971	Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5
	972	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1
	973	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2
	974	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3
	975	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4
	976	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5
6547.BHA		Operasi Bidang Pertahanan
	977	Pembinaan Fungsi Intelijen TNI AU
	978	Operasi Militer Selain Perang

10. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Keuangan (015)

Kode	No	Uraian
1	2	3
015.01		Sekretariat Jenderal
4751.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	1	Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan
	2	Rekomendasi/Kajian Perpajakan
	3	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
4751.BCE		Penanganan Perkara
	4	Administrasi Persidangan
4751.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	5	Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri
4752.FAM		Hasil Kelolaan Dana
	6	Seleksi Beasiswa
	7	Penilaian Program dan Penerima Beasiswa
	8	Persiapan Keberangkatan (PK) Penerima Beasiswa
	9	Seleksi Riset
	10	Penilaian Program dan Penerima Riset
4755.BMB		Komunikasi Publik
	11	Layanan Kepustakaan
	12	Pengembangan Contact Center Kemenkeu 134
	13	Publikasi Media Cetak
	14	Publikasi Media Elektronik
	15	Publikasi Media Website
4757.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	16	Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS
4757.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	17	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I
4757.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	18	Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Organisasi
	19	Asistensi Pembangunan, Penilaian, dan Monev Keberlanjutan ZI/WBK/WBBM kepada Satker Lingkup Kemenkeu
4757.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	20	Pengelolaan Jafung
015.02		Inspektorat Jenderal
4738.EBA		Layanan Manajemen SDM Internal
	21	Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
4740.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	22	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I
4741.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal
	24	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara
	25	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara
	26	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
	27	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L
	28	Rekomendasi Hasil Penindakan
	29	Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN
	30	Rekomendasi Kepatuhan Internal
6885.AAH		Peraturan lainnya
	31	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan
015.03		Ditjen Anggaran
4690.BMB		Komunikasi Publik

Kode	No	Uraian
1	2	3
	32	Publikasi Media Elektronik
4766.FAD		Perencanaan dan Penganggaran
	33	Nota Keuangan APBN/P
4776.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	34	Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat
	35	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II
4777.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	36	Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
4778.FAD		Perencanaan dan Penganggaran
	37	Pagu Indikatif
	38	Pagu Anggaran
	39	Pagu Alokasi
	40	DIPA
4785.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	41	Joint Program Penerimaan (PU)
4785.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	42	Rekomendasi Pengawasan PNBPN (PU)
4786.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	43	Kajian PNBPN
4786.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	44	Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNBPN
015.04		Ditjen Pajak
4708.EBA		Data dan Informasi Publik
	45	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi
4709.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	46	Rekomendasi Kepatuhan Internal
4710.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	47	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan
4791.BMA		Data dan Informasi Publik
	48	Data dan Informasi Perpajakan
	49	Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan
4792.AEA		Koordinasi
	50	Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
	51	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
	52	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional
4792.AEC		Kerja sama
	53	Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya
4792.AEG		Konferensi dan Event
	54	Kemitraan Perpajakan Internasional
4792.BMA		Data dan Informasi Publik
	55	Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Humas DJP
4792.BMB		Komunikasi Publik
	56	Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan
	57	Layanan dan Konsultasi Perpajakan
	58	Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan
	59	Layanan Kepustakaan
	60	Pembinaan/Edukasi Publik
4794.BIG		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
	61	Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak
	62	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan
	63	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)
4794.FAJ		Benda Meterai dan Cukai

Kode	No	Uraian
1	2	3
	64	Benda Meterai
4795.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	65	Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum
	66	Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan
	67	Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
	68	Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional
	69	Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan
	70	Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional
	71	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus
	72	Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan
	73	Kajian di Bidang Keberatan dan Banding
	74	Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan
6209.BCE		Penanganan Perkara
	75	Dokumen Penyelesaian Banding DJP
	76	SK Keberatan/Non Keberatan
	77	Dokumen Peninjauan Kembali DJP
015.05		Ditjen Bea Dan Cukai
4696.BMB		Komunikasi Publik
	78	Layanan Kepustakaan
	79	Contact Center
	80	Pameran/Eksibisi
	81	Publikasi Media Cetak
	82	Publikasi Media Elektronik
	83	Implementasi PUG
4697.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	84	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
4697.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	85	Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan
	86	Penilaian Unit ZI WBBM
	87	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan
	88	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi
4699.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	89	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
4768.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	90	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)
4768.AEB		Forum
	91	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)
4768.AEC		Kerja sama
	92	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai
	93	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas
4769.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	94	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
4770.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	95	Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan
4787.BIG		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
	96	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
	97	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang
4787.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	98	Asistensi Di Bidang Cukai
	99	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan
	100	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan
	101	Asistensi Di Bidang Pengelolaan Penerimaan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	102	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum
	103	Asistensi di bidang pengawasan kepabeanaan dan cukai
	104	Asistensi di bidang audit kepabeanaan dan cukai
4787.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	105	Sertifikasi AEO/MITA
	106	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)
4787.QAE		Pelayanan Publik kepada UMKM
	107	Promosi Ekspor UMKM (PN)
4788.BCE		Penanganan Perkara
	108	Putusan Penanganan Perkara
	109	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanaan dan Cukai
4789.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	110	Pemberantasan Narkotika
	111	Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)
	112	Patroli Laut
	113	Pengoperasian Kapal Patroli
4789.BIG		Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
	114	Laporan Hasil Audit (LHA)
	115	Analysis Targetting
	116	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan
4789.QHB		Operasi Bidang Keamanan
	117	Joint Task Force On Illegal Goods (PN)
015.06		Ditjen Perimbangan Keuangan
4729.BMB		Komunikasi Publik
	118	Layanan Kepustakaan
	119	Publikasi Media Cetak
	120	Publikasi Media Elektronik
4730.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	121	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I
4772.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	122	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN
	123	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah
	124	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)
	125	ALCO Regional (PU)
	126	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)
4779.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	127	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa
4779.UBB		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
	128	Bimtek BUMDes (PN)
4780.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	129	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
	130	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)
	131	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)
4781.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	132	Laporan Keuangan TKD dan Hibah
6609.AAH		Peraturan lainnya
	133	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan
7789.BMA		Data dan Informasi Publik
	134	Data Non Keuangan Daerah
015.07		Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko
4807.BMA		Data dan Informasi Publik
	135	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat

Kode	No	Uraian
1	2	3
4807.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	136	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor
4808.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	137	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang
	138	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko
4808.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
	139	Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur
	140	Register Pinjaman dan Hibah
	141	Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan
	142	Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02
	143	Penerbitan SBSN
	144	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN
	145	Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor
	146	Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN
	147	Perjanjian Pinjaman dan Hibah
	148	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah
	149	Penguatan Hubungan Kelembagaan
	150	Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara
	151	Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor
	152	Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN
	153	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN
4808.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	154	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)
4809.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	155	Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara
	156	Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara
	157	Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan
	158	Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara
	159	Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi
4810.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	160	Laporan Statistik Utang, Hibah, dan Pembiayaan Lainnya
6217.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	161	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS)
6389.FAM		Hasil Kelolaan Dana
	162	Hasil Kelolaan Dana Investasi
	163	Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/Pinjaman
015.08		Ditjen Perbendaharaan
4718.BMB		Sistem Informasi Pemerintahan
	164	Implementasi PUG
4725.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	165	Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)
6212.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	166	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU
	167	Penajaman Metode Analytical BLU
6212.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	168	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)
	169	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN
6212.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	170	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas
	171	Konsultasi Pencairan Dana
6213.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	172	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah
6213.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	173	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan
6213.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	174	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
	175	Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah
	176	Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan
	177	ALCo Regional
6213.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	178	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
6214.FAL		Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
	179	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
6215.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	180	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
6216.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	181	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia
	182	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan
	183	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
	184	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan
015.09		Ditjen Kekayaan Negara
4702.BMB		Komunikasi Publik
	185	Contact Center
4798.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	186	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan
4798.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	187	Pengelolaan Jafung
4798.FAD		Perencanaan dan Penganggaran
	188	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga
4798.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	189	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang
	190	Peta Tematik BMN (PU)
4799.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	191	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN
4800.FAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	192	Laporan Barang Milik Negara
4801.ACD		Perizinan Lembaga
	193	Perizinan Balai Lelang
015.11		Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan
4681.BMB		Komunikasi Publik
	194	Jurnal BPPK
	195	Pameran/Eksibisi
4682.BMB		Komunikasi Publik
	196	Jurnal Keuangan Negara
4683.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	197	Kajian Akademis BPPK
4683.CAA		Sarana Bidang Pendidikan
	198	Program dan Materi Pembelajaran
4683.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	199	Sertifikasi Kompetensi
	200	Alat Uji
	201	Manajemen Pengetahuan
	202	Regional Training Center
4683.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	203	Learning Organization
	204	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan
	205	AKP Kewilayahan
4684.DBA		Pendidikan Tinggi
	206	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan
	207	Program Pengabdian Masyarakat
7062.DBA		Pendidikan Tinggi
	208	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama
015.12		Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal
7792.AEG		Konferensi dan Event
	209	International Tax Forum
015.13		Lembaga National Single Window
4746.BMB		Komunikasi Publik
	210	Contact Center
4747.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	211	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan
4749.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	212	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW
	213	Lisensi Sistem INSW
6611.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	214	Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW
6611.AED		Perjanjian
	215	Perjanjian kerjasama di bidang Single Window
6611.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	216	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor dan Logistik (PN)
015.14		Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Sektor Keuangan
7794.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	217	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral
015.15		Badan Teknologi, Informasi, Dan Intelijen Keuangan
7778.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	218	Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu

11. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

Kode	No	Uraian
1	2	3
018.01		Sekretariat Jenderal
1753.ADC		Sertifikasi Produk
	1	Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pertanian
	2	Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian
018.02		Inspektorat Jenderal
4578.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	3	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat I
	4	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat I
	5	Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat I
	6	Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat I
	7	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat II
	8	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat II
	9	Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat II
	10	Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat II
	11	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III
	12	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat III
	13	Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat III
	14	Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III
	15	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat IV
	16	Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat IV
	17	Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat IV
	18	Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat IV
	19	Laporan Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
018.06		Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan
1783.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	20	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan
1783.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk
	21	Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan
1784.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	22	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan
1784.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk
	23	Hasil Uji Mutu Obat Hewan
1785.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	24	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak
1786.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	25	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner
1786.QJA		Penyidikan dan Pengujian Produk
	26	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan
5891.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	27	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

12. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perindustrian (019)

Kode	No	Uraian
1	2	3
019.04		Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
6062.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
	1	Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan
	2	Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam,Mesin,Alat Transportasi, dan Elektronika
	3	Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Nasional
6062.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	4	Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur
	5	Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas
	6	Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya
	7	Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control
	8	Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing
	9	Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas
	10	Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing
	11	Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN
	12	Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika
	13	Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029
	14	Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Hilirisasi Sumber Daya Alam
	15	Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan
	16	Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri
6063.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	17	Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture)
	18	Industri Kreatif dan Digital yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional
	19	Fasilitasi Industri Pengolahan Sisa Hasil Produksi Industri Smelter Logam Bukan Besi dan Turunannya
6068.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	20	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
6070.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	21	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan
	22	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan
	23	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan
6966.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	24	Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem
019.05		Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka
6071.QDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	25	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan
	26	IKM PFBB yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital

Kode	No	Uraian
1	2	3
	27	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Akses Pasar
	28	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
	29	Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan
	30	IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM / Literasi Digital
	31	IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
	32	IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitas Bantuan Mesin/Peralatan
	33	IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM / Literasi Digital
	34	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
	35	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6071.QGA		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
	36	Pembiayaan Lembaga Pengelola Program
019.07		Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri
6077.AEC		Kerja sama
	37	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
6077.BAD		Pelayanan Publik kepada industri
	38	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
	39	Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi
	40	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
	41	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
	42	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
	43	Jasa Pelayanan Konsultansi
	44	Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
	45	Jasa Pelayanan Verifikasi
	46	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
	47	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik
6077.BDI		Fasilitas dan Pembinaan Industri
	48	Pemanfaatan Teknologi Industri
6077.QDI		Fasilitas dan Pembinaan Industri
	49	Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0
6078.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	50	Perumusan Rancangan Standar Industri Hijau
6078.QDI		Fasilitas dan Pembinaan Industri
	51	Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi
6079.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	52	Rancangan SNI, ST dan/atau PTC
6079.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	53	Hasil Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian

13. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

Kode	No	Uraian
1	2	3
020.04		Ditjen Minyak Dan Gas Bumi
6348.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	1	Penilaian dan Penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
	2	Formulasi Harga Minyak Mentah
	3	Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau reviu Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri
	4	Penerimaan Negara dan PNBP Migas
	5	Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi
	6	Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia
	7	Kebijakan terkait Harga Bahan Bakar Migas
	8	Rekomendasi Kebijakan terkait Subsidi Bahan Bakar Migas
	9	Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi
	10	Pengawasan Investasi Migas
6348.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	11	Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran
6348.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	12	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi
020.05		Ditjen Ketenagalistrikan
6350.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	13	Harga Tenaga Listrik
6350.ACD		Perizinan Lembaga
	14	Perizinan di Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika
6350.ADE		Akreditasi Lembaga
	15	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
6350.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	16	Layanan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
6350.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	17	Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik
	18	Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik
	19	Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk
	20	Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi
	21	Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat
	22	Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai target NZE
6350.PEC		Kerja sama
	23	Monitoring dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan
6350.QEG		Bantuan Peralatan / Sarana
	24	Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T
6350.QIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	25	Pengawasan dan Pengendalian Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik
	26	Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari
020.07		Dewan Energi Nasional
6382.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	27	Rumusan rekomendasi penyiapan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor

Kode	No	Uraian
1	2	3
	28	Rumusan Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia
6382.BMA		Data dan Informasi Publik
	29	Rumusan neraca energi nasional
	30	Layanan kerja sama luar negeri
020.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Esdm
1915.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	31	Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi PPSDM Geominerba
6344.AEH		Promosi
	32	Pengelolaan Pameran dan Promosi Pendidikan Sektor Geominerba
6344.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	33	Pelaksanaan IPTEK Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pendidikan Tridharma Sektor Migas
	34	Akreditasi Lembaga PEM Akamigas
	35	Aktualisasi Dosen PEM Akamigas
	36	Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Pendidikan Sektor Geominerba
	37	Aktualisasi Dosen PEP Bandung
	38	Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung
6344.BMA		Data dan Informasi Publik
	39	Publikasi Jurnal dan Buletin Pendidikan Subsektor Migas
6344.SAG		Pendidikan Vokasi Bidang Industri
	40	Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS
	41	Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEP Bandung
6345.AEC		Kerja sama
	42	Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor MIGAS
	43	Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor Geominerba
	44	Kerjasama PPSDM KEBTKE
	45	Kerja sama BDTBT
6345.AEH		Promosi
	46	Promosi, Layanan Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Bidang KEBTKE
6345.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	47	NSPK Pengembangan SDM Subsektor MIGAS
	48	NSPK Pengembangan SDM Subsektor Geominerba
	49	NSPK Pengembangan Subsektor KEBTKE
	50	NSPK Pengembangan Sumber Daya Manusia Subsektor Tambang Bawah Tanah
6345.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	51	Evaluasi Pelatihan Pengembangan SDM Subsektor MIGAS
	52	Pengelolaan Sertifikasi dan Akreditasi Sub Sektor Migas
6345.SCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur
	53	Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE
6345.SCH		Pelatihan Bidang Industri
	54	Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi
	55	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara
	56	Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah
6452.BMA		Data dan Informasi Publik
	57	Pengelolaan Data dan Informasi Publik PEP Bandung
6452.CAN		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	58	Pengelolaan Sistem Informasi PEM Akamigas
020.13		Badan Geologi
6346.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim

Kode	No	Uraian
1	2	3
	59	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi
	60	Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan
6346.BMA		Data dan Informasi Publik
	61	Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Kebencanaan Geologi
6346.BMB		Komunikasi Publik
	62	Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gunung Api
	63	Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
	64	Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gerakan Tanah
	65	Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi Terpadu
6346.PBS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	66	Rekomendasi Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Pernataan Ruang dan Infrastruktur
	67	Rekomendasi Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rawan Bencana
6346.QMA		Data dan Informasi Publik
	68	Peta Zona Kerentanan Likuifaksi
	69	Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya
6346.RCM		OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana
	70	Optimalisasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi
6347.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	71	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	72	Usulan Wilayah Pertambangan Batubara
	73	Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
6347.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	74	Layanan BLU Geologi Kelautan
6347.BMA		Data dan Informasi Publik
	75	Layanan Data Konservasi Koleksi Geologi
	76	Pengelolaan Pelayanan Publik Museum Geologi
6347.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	77	Rekomendasi Penyelidikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi
	78	Rekomendasi Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah
	79	Rekomendasi Konservasi Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya
	80	Rekomendasi Keprospekan Migas
	81	Rekomendasi Warisan Geologi yang Ditetapkan
6347.QMA		Data dan Informasi Publik
	82	Pusat Informasi Geologi
	83	Pemetaan Sistematis Geologi Skala 1:50.000
	84	Pemetaan Tematik Patahan Aktif
020.14		Bph Migas
6351.AAH		Peraturan lainnya
	85	SK Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
	86	Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
6351.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	87	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
6351.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	88	Pelayanan Kepada Badan Usaha Melalui Diklat Operasi SPBU
	89	Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkut dan Badan Usaha Niaga

Kode	No	Uraian
1	2	3
6351.BMA		Data dan Informasi Publik
	90	Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	91	Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
6351.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	92	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga
6351.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	93	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga
020.15		Ditjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
6352.ABI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	94	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biomassa dan Biogas
	95	Rekomendasi Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi
6352.AEC		Kerja sama
	96	Kerja Sama Bidang Bioenergi
6352.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	97	Rancangan Standar dan Panduan Bidang Bioenergi
	98	Rancangan Standar dan Panduan Bidang Konservasi Energi
6352.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	99	Investasi Bidang Bioenergi
	100	Investasi Bidang Panas Bumi
6352.BDI		Fasilitasi dan Pembinaan Industri
	101	Pembinaan Pengusahaan Bioenergi, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dan Rekomendasi Ekspor Impor Bahan Bakar Nabati
	102	Investasi di Bidang Konservasi Energi
6352.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	103	Manajemen Energi Lembaga
6352.BIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	104	Monitoring dan Evaluasi K3 dan Lingkungan Bioenergi
6352.PBI		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
	105	Volume Biofuel untuk Domestik
	106	Penurunan Intensitas Energi Final
	107	Penawaran Wilayah Panas Bumi
	108	Penetapan Wilayah Panas Bumi
6352.PDA		Standarisasi Produk
	109	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi
6353.FAD		Perencanaan dan Penganggaran
	110	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur EBTKE
6353.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	111	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
6353.FAG		Pengawasan Pembangunan
	112	Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

14. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022)

Kode	No	Uraian
1	2	3
022.01		Sekretariat Jenderal
1940.ABM		Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
	1	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Sektor Transportasi
1941.AEB		Forum
	2	Forum Komunikasi Sektor Transportasi
5877.AEE		Kemitraan
	3	Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi
022.02		Inspektorat Jenderal
4669.AEC		Kerja sama
	4	Kerjasama Bidang Pengawasan
022.03		Ditjen Perhubungan Darat
4637.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	5	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banyumas
4637.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	6	Layanan Angkutan Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Prioritas Nasional)
	7	Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional)
	8	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)
	9	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Balikpapan (Prioritas Nasional)
	10	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional)
4638.CDP		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat
	11	Terminal Penumpang Tipe-A dikelola
	12	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola
4639.CCC		OM Sarana Bidang Konektivitas Darat
	13	Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor
4639.CDP		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat
	14	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola
4639.PEH		Promosi
	15	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)
022.04		Ditjen Perhubungan Laut
4658.CBR		Dukungan Teknis
	16	Perencanaan Teknis
4658.CCE		OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
	17	OM Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
	18	OM Telekomunikasi Pelayaran
	19	OM Kapal Negara
	20	OM Pengamatan Laut
4658.CDD		OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut
	21	OM Fasilitas Pendukung
	22	OM Bangunan Operasional
4659.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	23	Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan
	24	Layanan Konektivitas Angkutan Barang
	25	Layanan Konektivitas Angkutan Ternak
	26	Layanan Konektivitas Angkutan Rede
	27	Layanan Konektivitas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
4660.CBR		Dukungan Teknis

Kode	No	Uraian
1	2	3
	28	Perencanaan Teknis
4660.CCE		OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
	29	OM Peralatan Pendukung Operasional
4660.CDD		OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut
	30	Laporan Dokumen Lingkungan
4661.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	31	Studi
	32	Kebijakan
4661.CDS		OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	33	OM Software
	34	OM Hardware
022.05		Ditjen Perhubungan Udara
1960.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	35	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Angkutan Udara
1960.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	36	Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara
	37	Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara
4614.AEC		Kerja sama
	38	Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional
4645.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	39	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara
4645.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	40	Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara
4645.RBE		Prasarana Bidang Konektivitas Udara
	41	Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang
4646.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	42	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan
	43	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
	44	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan
4646.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	45	Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan
	46	Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan
4646.CBE		Prasarana Bidang Konektivitas Udara
	47	Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan
4646.CCD		OM Sarana Bidang Konektivitas Udara
	48	Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan
4646.CCL		Prasarana Bidang Konektivitas Udara
	49	Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
4647.CBE		Prasarana Bidang Konektivitas Udara
	50	Dokumen Pendukung Bandar Udara
4647.CDE		OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara
	51	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
	52	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan
	53	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)
022.08		Ditjen Perkeretaapian
4641.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	54	Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api

Kode	No	Uraian
1	2	3
4641.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	55	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang
	56	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput
	57	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam
	58	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan
	59	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare
	60	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri
	61	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5
4642.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	62	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian
4642.CCK		OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
	63	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
	64	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
4642.CDA		OM Prasarana Bidang Perkeretaapian
	65	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)
	66	Perawatan Prasarana Perkeretaapian
	67	Operasi Prasarana Perkeretaapian
4643.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	68	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian
4643.CCK		OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
	69	Operasi Sarana Perkeretaapian
	70	Perawatan Sarana Perkeretaapian
	71	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
4643.RBA		Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian
	72	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)
022.11		Badan Kebijakan Transportasi
6891.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
	73	Rumusan NSPK Transportasi
	74	Kebijakan Pembangunan Transportasi
022.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1975.AEC		Kerja sama
	75	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat
	76	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut
	77	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara
1975.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	78	SKKNI Transportasi Udara
	79	Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Darat
	80	Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Udara
	81	Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara
1975.BMA		Data dan Informasi Publik
	82	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Darat
	83	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Laut
	84	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Udara
1975.DAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
	85	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut
1975.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur
	86	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten
	87	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten

Kode	No	Uraian
1	2	3
	88	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten
	89	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten
	90	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten
	91	Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Darat
	92	Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Laut
	93	Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Udara
1979.AEC		Kerja sama
	94	Kerja sama (SBK)
3996.AEC		Kerja sama
	95	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat
	96	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut
	97	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara
3996.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	98	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat
	99	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut
	100	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara
3996.BMA		Data dan Informasi Publik
	101	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Darat
	102	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Laut
	103	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara
	104	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat
	105	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut
	106	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara
3996.DAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
	107	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat
3996.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur
	108	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat
	109	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut
	110	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut
	111	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyegaran Transportasi Laut
	112	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara
	113	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat
	114	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut
	115	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara
3996.SAB		Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur
	116	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)
3996.SCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur
	117	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)
	118	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional)
	119	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)

15. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

Kode	No	Uraian
1	2	3
024.02		Inspektorat Jenderal
2052.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	1	Pelaksanaan Pengawasan Program Transformasi Sistem Kesehatan/ Program Strategis Kementerian Kesehatan
	2	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota Lingkup Mitra Strategis Inspektorat
	3	Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi Lingkup Mitra Strategis Inspektorat
	4	Layanan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji
	5	Layanan Penilaian Good Public Governance
	6	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
2056.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	7	Hasil Pengawasan Internal
	8	Pembinaan/Penilaian Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Lingkup Kementerian Kesehatan
024.03		Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas
4812.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	9	Modular Aplikasi Kesprimkom
7954.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	10	Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS)
024.04		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
7957.PDE		Akreditasi Lembaga
	11	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna
7958.DCM		Pelatihan Bidang Kesehatan
	12	Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)
7958.SCM		Pelatihan Bidang Kesehatan
	13	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)
	14	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)
	15	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR
	16	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)
024.05		Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
7956.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	17	Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori I
	18	Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori II
7960.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	19	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)
	20	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara
	21	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN
	22	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jakarta, Papua
	23	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional
	24	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh wilayah Jakarta Papua
	25	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD
	26	Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis
	27	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare
	28	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria

Kode	No	Uraian
1	2	3
	29	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD
	30	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria
	31	Layanan survei faktor risiko penyakit diare
	32	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS
	33	Layanan survei faktor risiko penyakit TB
	34	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat wilayah Jakarta Papua
	35	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan
	36	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria
	37	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria skala besar
	38	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota
	39	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Jakarta, Papua
	40	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota
	41	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala kecil
	42	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala besar
	43	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota
	44	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala kecil
	45	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala besar
	46	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
	47	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
	48	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
	49	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
	50	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara
	51	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
	52	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Jawa, Bali, Nusa Tenggara
	53	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi
7961.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	54	NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori I (HS-29)
	55	NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori II (HS-29)
	56	NSPK Kesehatan Lingkungan Kategori I (HS-29)
024.07		Ditjen Farmasi Dan Alat Kesehatan
4814.CBT		Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	57	Pemeliharaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
7962.ACD		Perizinan Lembaga
	58	Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
7962.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	59	Sistem Informasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
7965.ADF		Sertifikasi Lembaga
	60	Sertifikasi dan Penilaian Kepatuhan Penerapan CDAKB
7965.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	61	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Produk Alat Kesehatan dan PKRT

16. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)

Kode	No	Uraian
1	2	3
025.05		Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen
2136.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
	1	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP
	2	Siswa SMPTK Penerima PIP
	3	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS
	4	Siswa SMPTK Penerima BOS
	5	Siswa SDTK Penerima BOS
2137.PEG		Konferensi dan Event
	6	Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparawi)
2137.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	7	Lembaga Keagamaan Kristen dan Lembaga Budaya Keagamaan Kristen Yang Dibina dan Difasilitasi
	8	Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan
2137.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	9	Penyuluh Agama Kristen Non ASN Penerima Tunjangan
4434.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM
	10	Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi
4434.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	11	Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya
4434.QEI		Bantuan Lembaga
	12	Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan
4434.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
	13	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi
4434.SCI		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan
	14	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya
5101.BGC		Pelatihan Bidang Pendidikan
	15	PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNBPN
5101.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	16	Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi
5101.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi
	17	Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah
025.06		Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik
2131.PDG		Standardisasi Profesi dan SDM
	18	Dosen yang tersertifikasi
025.09		Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
2149.UAH		Pengelolaan Keuangan Negara
	19	Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel
025.11		Badan Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan
7894.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	20	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan
7898.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	21	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan
7898.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	22	Tenaga Teknis Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Platform Pembelajaran Digital

17. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Ketenagakerjaan (026)

Kode	No	Uraian
1	2	3
026.13		Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
4053.PDF		Sertifikasi Lembaga
	1	Pembinaan LSP
4053.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	2	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih
	3	Lulusan pelatihan vokasi yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja
4053.PFA		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
	4	Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja
4055.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	5	Instruktur Yang Berkompetensi Tinggi
	6	Tenaga Pelatihan Berkompetensi Tinggi
	7	Instruktur Berkinerja Tinggi

18. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

Kode	No	Uraian
1	2	3
032.01		Sekretariat Jenderal
6453.BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	1	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU
6453.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	2	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha
6453.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	3	Laporan Pengelolaan Keuangan
	4	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha
032.03		Ditjen Perikanan Tangkap
2337.BKB		Pemantauan produk
	5	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya
2339.PCA		Perizinan Produk
	6	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan
2341.QKB		Pemantauan produk
	7	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi
032.04		Ditjen Perikanan Budidaya
7021.QED		Bantuan Tanaman
	8	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat
7022.QEL		Bantuan Hewan
	9	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
	10	Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat
	11	Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
	12	Benih Ikan Udang yang disalurkan ke masyarakat
7022.QJC		Penyidikan dan Pengujian Penyakit
	13	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji
7023.QEL		Bantuan Hewan
	14	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat
	15	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat
7023.QJC		Penyidikan dan Pengujian Penyakit
	16	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji
7024.QEL		Bantuan Hewan
	17	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
	18	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
7024.QJC		Penyidikan dan Pengujian Penyakit
	19	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji
032.05		Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
2351.AEA		Koordinasi
	20	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan
2351.AFA		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
	21	NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran
2351.BCE		Penanganan Perkara
	22	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani
	23	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana
2352.ACA		Perizinan Produk
	24	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan
2352.AFA		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
	25	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
	26	NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
2352.BHD		Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
	27	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	28	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan
2352.BII		Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
	29	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan
2352.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	30	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan
	31	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan
2352.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	32	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
	33	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
2352.RDS		OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	34	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
2353.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	35	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
	36	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan
2353.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	37	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
032.06		Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
2357.PBR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
	38	Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri
2357.PEE		Kemitraan
	39	Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri
	40	Kerjasama pemasaran rumput laut
2357.PEH		Promosi
	41	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
	42	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional
	43	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri
2358.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	44	Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah
5279.ADA		Standarisasi Produk
	45	Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya
5279.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi
	46	Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
7025.BMA		Data dan Informasi Publik
	47	Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP
7025.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	48	Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)
7026.PEH		Promosi
	49	Promosi Usaha dan Investasi KP
7026.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	50	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha
7026.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	51	Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina
032.12		Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
2375.ABW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
	52	Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2375.AFA		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
	53	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2376.SAC		Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
	54	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

19. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

Kode	No	Uraian
1	2	3
035.01		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2490.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	1	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
	2	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah
	3	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
2491.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	4	Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital
2521.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	5	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan
4543.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	6	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
	7	Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4550.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM
	8	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja

20. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036)

Kode	No	Uraian
1	2	3
036.01		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
6336.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	1	Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas
6336.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	2	Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan
	3	Telaahan Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
6338.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	4	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana
	5	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Bencana
	6	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	7	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Konflik Sosial
6338.AEA		Koordinasi
	8	Koordinasi Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)
6339.ABG		Kebijakan Bidang Kesehatan
	9	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	10	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
	11	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan, Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan
6339.PEA		Koordinasi
	12	Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting
	13	Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis
6340.ABN		Kebijakan Bidang Sosial
	14	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
	15	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
	16	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
	17	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan
6340.AEA		Koordinasi
	18	Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI 2025 - 2029
	19	Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi
6341.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	20	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
	21	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Budi Pekerti
	22	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bina Keagamaan
	23	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa
6341.AEA		Koordinasi
	24	Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
6342.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	25	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
	26	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi
	27	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan
	28	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Riset, Teknologi dan Kemitraan Industri
6342.AEA		Koordinasi
	29	Koordinasi Penguatan Pendidikan, Riset, dan Teknologi
7067.ABN		Kebijakan Bidang Sosial
	30	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

21. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (041)

Kode	No	Uraian
1	2	3
041.01		Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4419.BBD		Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha
	1	Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN
4420.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
	2	Rumusan Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengawasan BUMN bidang Hukum

22. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (047)

Kode	No	Uraian
1	2	3
047.01		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2787.AEC		Kerja sama
	1	Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA
2787.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	2	Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan anak di K/L
2790.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	3	K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG
2794.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	4	K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG
2795.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	5	K/L Bidang Ekonomi yang diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Penyelenggaraan PUG
2805.BEA		Bantuan Masyarakat
	6	AMPK yang mendapat pemenuhan kebutuhan khusus anak
2805.PDD		Standardisasi Lembaga
	7	Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
2809.PDD		Standardisasi Lembaga
	8	Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak
	9	Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak
2809.PEA		Koordinasi
	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAPL
2811.QMB		Komunikasi Publik
	11	KIE Kebijakan PHSIPA
2811.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	12	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA
2812.AEA		Koordinasi
	13	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
2812.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	14	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP
6373.PBN		Kebijakan Bidang Sosial
	15	Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Mental

23. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048)

Kode	No	Uraian
1	2	3
048.01		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
6189.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	1	Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
6191.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	2	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
6191.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
	3	Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi
	4	Evaluasi WBK/WBBM
	5	Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	6	Asistensi Tim Reformasi Birokrasi
6195.AEA		Koordinasi
	7	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

24. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Intelijen Negara (050)

Kode	No	Uraian
1	2	3
050.01		Badan Intelijen Negara
2851.DBA		Pendidikan Tinggi
	1	Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
	2	Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
5235.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	3	Analisis Bidang Ideologi Politik dan Sosial Budaya
	4	Analisis Bidang Keamanan Nasional
	5	Analisis Bidang Ekonomi
	6	Analisis Bidang Luar Negeri

25. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Siber dan Sandi Negara (051)

Kode	No	Uraian
1	2	3
051.01		Badan Siber dan Sandi Negara
3123.AEC		Kerja sama
	1	Kerjasama Kemitraan Pendidikan Tinggi
3123.AEG		Konferensi dan Event
	2	Konferensi dan Event Poltek SSN
3123.AEH		Promosi
	3	Promosi Poltek SSN
6653.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	4	Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Tata Kelola Keamanan Siber
	5	Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
	6	Rekomendasi Kebijakan Prioritas bidang SDM Keamanan Siber dan Sandi
6654.AEB		Forum
	7	Forum Keamanan Siber
6655.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	8	Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Pusat
6655.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	9	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
6656.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	10	Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata

26. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

Kode	No	Uraian
1	2	3
054.01		Badan Pusat Statistik
2887.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	1	Diklat Teknis Substansi
	2	Diklat Fungsional
	3	Standarisasi dan Sertifikasi
2888.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	4	Program DIII
	5	Program DIV
2896.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	6	Pembinaan Statistik Sektoral Pengembangan Dan Analisis
2896.BMA		Data dan Informasi Publik
	7	Publikasi/ Laporan Indeks Pembangunan Manusia
2898.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	8	Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Pengeluaran
2899.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	9	Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Produksi
2899.BMA		Data dan Informasi Publik
	10	Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)
2902.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	11	Pembinaan Statistik Sektoral Distribusi
2903.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	12	Pembinaan Statistik Sektoral Harga
2904.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	13	Pembinaan Statistik Sektoral Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi Dan Konstruksi
2905.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	14	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
2906.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	15	Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat
2907.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	16	Pembinaan Statistik Sektoral Ketahanan Sosial
2908.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	17	Pembinaan Statistik Sektoral Keuangan, Teknologi Informasi Dan Pariwisata
2909.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	18	Pembinaan Statistik Sektoral Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan
2910.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	19	Pembinaan Statistik Sektoral Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
4203.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	20	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I
4204.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	21	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II
4205.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	22	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III

27. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas (055)

Kode	No	Uraian
1	2	3
055.01		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6263.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
	1	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
6268.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	2	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Politik dan Komunikasi
6271.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	3	Kebijakan Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan
	4	Kebijakan Analisis Kinerja
	5	Kegiatan Tata Kelola Internal PAKK

28. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

Kode	No	Uraian
1	2	3
056.01		Sekretariat Jenderal
5519.AEC		Kerja sama
	1	Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri
	2	Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri
5526.AEC		Kerja sama
	3	Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi
5526.DBA		Pendidikan Tinggi
	4	Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan
6411.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	5	SK Surveyor Berlisensi
6412.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	6	Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500
	7	Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000
6412.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	8	Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000
6413.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	9	Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Printout Digital Warkah
	10	Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi
	11	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)
	12	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun
	13	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)
	14	Layanan Legalisasi Gambar Ukur
6413.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	15	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1
	16	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2
	17	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3
	18	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4
	19	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5
	20	PBT Non Sistematis Kategori 1
	21	PBT Non Sistematis Kategori 2
	22	PBT Non Sistematis Kategori 3
	23	PBT Non Sistematis Kategori 4
	24	PBT Non Sistematis Kategori 5
6413.QAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
	25	PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1
	26	PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2
	27	PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3
	28	PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4
	29	PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5
	30	PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1
	31	PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2
	32	PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3
	33	PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5
	34	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3
	35	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5
	36	PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali

Kode	No	Uraian
1	2	3
	37	PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali
	38	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali
	39	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali
	40	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga
	41	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga
6413.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	42	Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali
	43	Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali
6422.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
	44	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis)
	45	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis)
6422.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	46	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I
	47	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II
056.03		Direktorat Jenderal Tata Ruang
6668.PBT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
	48	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I
	49	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II
056.04		Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang
5544.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	50	NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik
5544.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	51	Layanan Peta Tematik Kawasan
5546.AFA		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
	52	NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
056.05		Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah
5549.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	53	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum
056.07		Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Pertanahan
5563.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	54	Lisensi Penilai Tanah (SK)
056.09		Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan
5576.BCE		Penanganan Perkara
	55	Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat

29. Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional RI (057)

Kode	No	Uraian
1	2	3
057.01		Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3004.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	1	Pemustaka Yang Memanfaatkan Layanan
3004.RAA		Sarana Bidang Pendidikan
	2	Alih Bahasa Naskah Kuno Nusantara
	3	Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara
	4	Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara
	5	Saduran Naskah Kuno Nusantara
	6	Kajian Naskah Kuno Nusantara
	7	Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of The World (MoW)
3005.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	8	ASN Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya
3005.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	9	Peserta Pelatihan Kepustakawanan (Metode Pembelajaran Bauran)
3008.ADG		Standarisasi Profesi dan SDM
	10	Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya
3008.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	11	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan
	12	Sertifikasi Pustakawan
3009.RAA		Sarana Bidang Pendidikan
	13	Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi
	14	Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media
	15	Bahan Perpustakaan yang Dialih media
3010.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	16	Pemustaka yang memanfaatkan layanan UPT Perpustakaan Proklamator
3010.CAA		Sarana Bidang Pendidikan
	17	Bahan Perpustakaan yang Diadakan, Diolah, Dianalisis, dan Dilestarikan
3010.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	18	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
4380.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	19	Pembinaan dan Penghargaan SSKCKR
4380.CAA		Sarana Bidang Pendidikan
	20	Naskah Kuno Nusantara yang Diadakan
	21	Koleksi KCKR yang Terhimpun
	22	Bahan Perpustakaan yang Diadakan
4381.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	23	Pengajuan ISBN yang Diproses
	24	Pengajuan ISMN yang Diproses
4381.CAA		Sarana Bidang Pendidikan
	25	Metadata Bibliografi yang Dihimpun
	26	Bahan Perpustakaan yang Diolah
4382.BMA		Data dan Informasi Publik
	27	Layanan Data dan Informasi Publik
4382.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	28	Perpustakaan Tergabung Jejaring
4383.PDE		Akreditasi Lembaga
	29	Akreditasi Perpustakaan Umum
	30	Akreditasi Perpustakaan Khusus
	31	Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Kode	No	Uraian
1	2	3
	32	Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
	33	Penjaminan Mutu Perpustakaan Terakreditasi
4385.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	34	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi
4386.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	35	Dokumen Hasil Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca, dan Literasi
4386.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	36	Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA)
5272.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	37	Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
5272.CAA		Sarana Bidang Pendidikan
	38	Bahan Perpustakaan Yang Diadakan, Diolah, Dan Dilestarikan
5272.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	39	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

30. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital (059)

Kode	No	Uraian
1	2	3
059.09		Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
7436.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	1	Persiapan, Pelaksanaan Dan Evaluasi On Site Kalibrasi Wilayah Pulau Jawa
7437.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	2	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera
	3	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera
	4	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sumatera
	5	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera
	6	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera
	7	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera
	8	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera
	9	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa
	10	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa
	11	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa
	12	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa
	13	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa
	14	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa
	15	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan
	16	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan
	17	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan
	18	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan
	19	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan
	20	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan
	21	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan
	22	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan
	23	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi
	24	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi
	25	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sulawesi
	26	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Sungai/Laut Wilayah Sulawesi
	27	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi
	28	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi

Kode	No	Uraian
1	2	3
	29	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi
	30	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua
	31	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua
	32	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua
	33	Pemantauan Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Papua
	34	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua
	35	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Papua
	36	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua
	37	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan
	38	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan
	39	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan
	40	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan
	41	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan
	42	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan
	43	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan
	44	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan
	45	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan
	46	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan

31. Kementerian Negara/Lembaga: Kepolisian Negara RI (060)

Kode	No	Uraian
1	2	3
060.01		Kepolisian Negara Republik Indonesia
3097.DBE		Pendidikan Non Gelar
	1	Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri
3098.DBA		Pendidikan Tinggi
	2	Pendidikan Tinggi Ilmu kepolisian (S3)
3099.DBE		Pendidikan Non Gelar
	3	Sekolah Staf dan Pimpinan menengah Polri
3100.DBE		Pendidikan Non Gelar
	4	Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
3100.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	5	Diklat Pim
3142.BCE		Penanganan Perkara
	6	Penanganan tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya
	7	Penanganan tindak pidana pidana yang terkait kekerasan terhadap anak
	8	Penanganan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan buruh dan penyelundupan manusia
4342.BCE		Penanganan Perkara
	9	Penanganan Tindak Pidana Perairan
5069.DCG		Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	10	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
5070.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	11	Penyusunan Kurikulum Diklat Polri

32. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

Kode	No	Uraian
1	2	3
063.01		Badan Pengawas Obat Dan Makanan
3165.QCD		Perkara Hukum Badan Usaha
	1	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jakarta
	2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Bandung
	3	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tasikmalaya
	4	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Bogor
	5	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Semarang
	6	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Banyumas
	7	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Surakarta
	8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Yogyakarta
	9	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Surabaya
	10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kediri
	11	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Jember
	12	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Banda Aceh
	13	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Aceh Tengah
	14	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Aceh Selatan
	15	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Medan
	16	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Tanjung Balai
	17	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Toba
	18	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Padang
	19	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Payakumbuh
	20	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sijunjung
	21	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Pekanbaru
	22	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Dumai
	23	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Indragiri Hilir
	24	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jambi
	25	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Bungo
	26	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Palembang
	27	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Lubuklinggau
	28	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Bandar Lampung
	29	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tulangbawang
	30	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Pontianak
	31	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sanggau
	32	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Palangka Raya
	33	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kotawaringin Barat
	34	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Banjarbaru
	35	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tabalong
	36	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tanah Bumbu
	37	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Balai Besar POM Di Samarinda
	38	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Balikpapan
	39	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tarakan
	40	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Manado
	41	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kepulauan Sangihe
	42	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Palu
	43	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Banggai
	44	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Makassar
	45	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Palopo
	46	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kendari

Kode	No	Uraian
1	2	3
	47	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Bau Bau
	48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Ambon
	49	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kepulauan Tanimbar
	50	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Denpasar
	51	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Buleleng
	52	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Mataram
	53	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Bima
	54	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kupang
	55	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Ende
	56	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Manggarai Barat
	57	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jayapura
	58	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Merauke
	59	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Mimika
	60	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Bengkulu
	61	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Rejang Lebong
	62	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Sofifi
	63	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Pulau Morotai
	64	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Serang
	65	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tangerang
	66	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Pangkal Pinang
	67	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Belitung
	68	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Gorontalo
	69	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Batam
	70	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Tanjungpinang
	71	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Manokwari
	72	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sorong
	73	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Mamuju
4118.BKB		Pemantauan produk
	74	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas

33. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ketahanan Nasional (064)

Kode	No	Uraian
1	2	3
064.01		Lembaga Ketahanan Nasional
3190.SBE		Pendidikan Non Gelar
	1	Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional
3191.DBE		Pendidikan Non Gelar
	2	Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional
3195.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	3	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
3197.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	4	Training Of Trainner (TOT) Nilai-Nilai Kebangsaan
3198.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	5	Dialog Wawasan Kebangsaan
3199.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	6	Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik
3200.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	7	Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam
3201.ABN		Kebijakan Bidang Sosial
	8	Kajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, dan Demografi
3202.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	9	Kajian Strategis Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Geografi

34. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

Kode	No	Uraian
1	2	3
066.01		Badan Narkotika Nasional
4020.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	1	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Kondisi Khusus di Balai Besar Rehabilitasi BNN
	2	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Besar Rehabilitasi BNN
	3	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Besar Rehabilitasi BNN
	4	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
	5	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
	6	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
	7	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
	8	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Batam
	9	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Batam
	10	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda
	11	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda
	12	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
	13	Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
6239.BJA		Penyidikan dan Pengujian Produk
	14	Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya

35. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)

Kode	No	Uraian
1	2	3
068.01		Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
3316.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	1	Pedoman di bidang akses pelayanan KB
3316.QEI		Bantuan Lembaga
	2	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon
3316.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	3	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB
3317.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	4	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan keluarga dengan anak usia dini
	5	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)
3319.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	6	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja
3319.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	7	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)
3319.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	8	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE)
	9	Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan BKR
	10	Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan GenRe
3320.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	11	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan
3322.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	12	Pedoman di bidang pelayanan KB wilayah khusus
3322.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	13	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dibidang pelayanan KB wilayah khusus
3324.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	14	Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga
3324.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	15	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia
	16	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan
3325.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	17	Pedoman di bidang Kerja sama Pendidikan kependudukan
3326.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	18	Pedoman di bidang Kebijakan Pengendalian Penduduk
3327.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	19	Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
3327.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	20	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB
3328.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	21	Pedoman di bidang analisis dampak kependudukan
3328.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Kode	No	Uraian
1	2	3
	22	Kampung Keluarga Berkualitas (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)
3329.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	23	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Prov/Kab/Kota
3331.DCJ		Pelatihan Bidang Sosial
	24	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota
3331.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	25	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja
	26	Kampung Keluarga Berkualitas
3331.QEI		Bantuan Lembaga
	27	Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)
3331.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	28	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus
7557.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	29	Pedoman di bidang tata kelola data dan Teknologi informasi

36. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)

Kode	No	Uraian
1	2	3
074.01		Komnas HAM
5679.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi
	1	Penyebarluasan Wawasan HAM
	2	Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia
	3	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
	4	Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
5680.BCC		Perkara Hukum Kelompok Masyarakat
	5	Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM

37. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (075)

Kode	No	Uraian
1	2	3
075.01		Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
3344.BMA		Data dan Informasi Publik
	1	Layanan Teknologi Komputasi dan Pengelolaan Data yang Standar, Valid, serta Terintegrasi
3345.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	2	Pemeliharaan Operasional Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas
3345.PEF		Sosialisasi dan Diseminasi
	3	Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat
	4	Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah
	5	Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur
3346.BMB		Komunikasi Publik
	6	Penerbitan Media Publikasi Dan Literasi Majalah Klima
3346.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	7	Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Barat
	8	Sekolah lapang Iklim Tematik Wilayah Tengah
	9	Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Timur
	10	Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Barat
	11	Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Tengah
3349.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	12	Layanan informasi meteorologi penerbangan melalui Sekolah lapang meteorologi penerbangan
3350.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi
	13	Sekolah Lapang Cuaca
3350.BMB		Komunikasi Publik
	14	Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
3352.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	15	Layanan Informasi Prediksi Musim Nasional
3353.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi
	16	Layanan informasi tanda waktu melalui Sekolah Lapang Hilal
3353.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	17	Layanan Informasi Posisi Bulan dan Matahari
3353.PBJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	18	Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar
5201.CCG		OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	19	Pemeliharaan operasional layanan informasi meteorologi maritim yang berkualitas
5201.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	20	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah barat
	21	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah tengah
	22	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah timur

38. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemilihan Umum (076)

Kode	No	Uraian
1	2	3
076.01		Komisi Pemilihan Umum
7016.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	1	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
7018.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	2	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan

39. Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi RI (077)

Kode	No	Uraian
1	2	3
077.01		Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
4246.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	1	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Kegiatan)

40. Kementerian Negara/Lembaga: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (078)

Kode	No	Uraian
1	2	3
078.01		Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
3365.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	1	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
3384.QCE		Penanganan Perkara
	2	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian
	3	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup

41. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial - BIG (083)

Kode	No	Uraian
1	2	3
083.01		Badan Informasi Geospasial
6445.CCI		OM Sarana Pengembangan Kawasan
	1	Stasiun Ina-Cors yang dikelola di Pulau Bali
	2	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Jawa
	3	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sumatera
	4	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Kalimantan
	5	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sulawesi
	6	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Nusa Tenggara
	7	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sumatera
	8	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Jawa
	9	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Kalimantan
	10	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sulawesi
	11	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Kepulauan Maluku
	12	Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Papua
	13	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Nusa Tenggara
	14	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Papua
	15	Stasiun Ina-Cors yang Dikelola di Pulau Maluku
	16	Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Bali
6449.DCB		Pelatihan Bidang Infrastruktur
	17	Pelatihan Kompetensi Profesi Bidang IG

42. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Tenaga Nuklir - BAPETEN (085)

Kode	No	Uraian
1	2	3
085.01		Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3563.AEC		Kerja sama
	1	Naskah Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral
3564.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	2	Sistem Informasi Pemerintahan
3568.ACB		Perizinan Masyarakat
	3	Izin Petugas Fasilitas Radiasi
	4	Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir
3568.ACD		Perizinan Lembaga
	5	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan
	6	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri
	7	Izin Reaktor dan Bahan Nuklir
3568.ADC		Sertifikasi Produk
	8	Sertifikasi Keandalan Peralatan Ketenaganukliran
3568.ADF		Sertifikasi Lembaga
	9	Penunjukan Laboratorium/Lembaga Uji dan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran
3568.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	10	Sertifikat Personil Uji Kesesuaian
	11	Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif
3568.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	12	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Keselamatan dan Keamanan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)
	13	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas Perizinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Radiologi
	14	Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif
	15	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Penyimpanan Lestari terhadap Sumber Radiasi Bekas dan Limbah Radioaktif guna Mendukung Aspek Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan
3569.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	16	Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir
4389.QII		Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
	17	Peta Rona Awal Radioaktivitas Lingkungan Calon Tapak PLTN

43. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara (086)

Kode	No	Uraian
1	2	3
086.01		Lembaga Administrasi Negara
3611.DBA		Pendidikan Tinggi
	1	Seleksi Penerimaan
	2	Wisuda
4827.ADE		Akreditasi Lembaga
	3	Akreditasi Program Pelatihan Pada Lembaga Pelatihan Pemerintah

44. Kementerian Negara/Lembaga: Arsip Nasional RI (087)

Kode	No	Uraian
1	2	3
087.01		Arsip Nasional Republik Indonesia
3624.FAA		Kearsipan
	1	Arsip Statis yang Diolah di BAST sebagai Sarana Temu Balik
3625.FAA		Kearsipan
	2	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Dipreservasi di BAST
3626.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	3	Layanan Jasa Penyimpanan Arsip (PNBP)
	4	Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (PNBP)
	5	Layanan Jasa Penataan Arsip (PNBP)
	6	Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan (PNBP)
	7	Layanan Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan (PNBP)
5357.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	8	SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi (PNBP)
5357.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	9	SDM Kearsipan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan
7034.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	10	Pemerintah Daerah Wilayah I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan
	11	Pemerintah Daerah Wilayah II yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan
7036.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	12	SDM yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis (PNBP)
	13	SDM yang Mengikuti Diklat Teknis Kearsipan (PNBP)
7037.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	14	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan
7037.ADE		Akreditasi Lembaga
	15	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi (PNBP)
7037.UAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
	16	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi
7038.FAA		Kearsipan
	17	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan
	18	Arsip Terjaga Nasional yang Diselamatkan
	19	Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan pada BAST
7039.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	20	Pengguna Layanan Arsip Statis Kepresidenan yang Memanfaatkan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa
7039.FAA		Kearsipan
	21	Arsip yang direproduksi/Laminasi (PNBP)
	22	Arsip Yang Dinominasikan sebagai Memory Of the World (MOW)
7039.UAA		Kearsipan
	23	Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)
7041.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
	24	Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN

45. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kepegawaian Negara (088)

Kode	No	Uraian
1	2	3
088.01		Badan Kepegawaian Negara
3639.BCE		Penanganan Perkara
	1	Penyelesaian Banding Administratif
3655.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	2	Penyelenggaraan seleksi non CASN dengan sistem CAT
3664.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	3	Pendidikan Ilmu Kepegawaian
4845.ABQ		Kebijakan Bidang Aparatur
	4	Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja ASN
4846.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
	5	Penetapan Mutasi Lainnya

46. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

Kode	No	Uraian
1	2	3
089.01		Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
3671.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	1	Hasil Pengawasan Internal BPKP
	2	Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal
	3	Hasil Evaluasi SAKIP BPKP
	4	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP
3674.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	5	Diklat Fungsional Auditor RM
	6	Diklat Fungsional Auditor PNBPNBP
	7	Diklat Fungsional Auditor STAR
	8	Diklat Teknis Substansi RM
	9	Diklat Teknis Substansi PNBPNBP
	10	Diklat Teknis Substansi STAR
	11	Diklat Sertifikasi Non JFA RM
	12	Diklat Sertifikasi Non JFA PNBPNBP
	13	Diklat Sertifikasi Non JFA STAR
	14	Pelatihan Daring Massal (MOOC) PNBPNBP
	15	Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBPNBP
3675.FAG		Pengawasan Pembangunan
	16	Hasil Analisis Isu Strategis dan Prioritas Pengawasan
	17	Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan
	18	Hasil Pengembangan Manajemen Pengetahuan dan Evaluasi Strategi Kebijakan Pengawasan
	19	Hasil Penguatan Strategi Kebijakan Pengawasan
3701.FAG		Pengawasan Pembangunan
	20	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	24	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
3701.UAG		Pengawasan Pembangunan
	25	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	26	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4207.FAG		Pengawasan Pembangunan
	27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	28	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	29	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	30	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4207.UAG		Pengawasan Pembangunan
	31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4208.FAG		Pengawasan Pembangunan
	32	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	33	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	34	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	35	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Kode	No	Uraian
1	2	3
	36	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4208.UAG		Pengawasan Pembangunan
	37	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	38	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	39	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	40	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4209.UAG		Pengawasan Pembangunan
	41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4210.FAG		Pengawasan Pembangunan
	42	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	43	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	44	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	45	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4210.UAG		Pengawasan Pembangunan
	46	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4211.FAG		Pengawasan Pembangunan
	47	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	48	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	49	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	50	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	51	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4211.UAG		Pengawasan Pembangunan
	52	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	53	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4212.FAG		Pengawasan Pembangunan
	54	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	55	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	56	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	57	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	58	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4212.UAG		Pengawasan Pembangunan
	59	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	60	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4213.FAG		Pengawasan Pembangunan
	61	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	62	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	63	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	64	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4213.UAG		Pengawasan Pembangunan
	65	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4214.FAG		Pengawasan Pembangunan
	66	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	67	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial

Kode	No	Uraian
1	2	3
	68	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	69	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4214.UAG		Pengawasan Pembangunan
	70	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4215.FAG		Pengawasan Pembangunan
	71	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	72	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	73	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	74	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4215.UAG		Pengawasan Pembangunan
	75	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4216.FAG		Pengawasan Pembangunan
	76	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	77	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	78	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	79	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4216.UAG		Pengawasan Pembangunan
	80	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4217.FAG		Pengawasan Pembangunan
	81	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	82	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	83	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	84	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4217.UAG		Pengawasan Pembangunan
	85	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4218.FAG		Pengawasan Pembangunan
	86	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	87	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	88	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	89	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4218.UAG		Pengawasan Pembangunan
	90	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4219.FAG		Pengawasan Pembangunan
	91	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	92	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	93	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	94	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4219.UAG		Pengawasan Pembangunan
	95	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4220.FAG		Pengawasan Pembangunan
	96	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	97	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	98	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi

Kode	No	Uraian
1	2	3
	99	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	100	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4220.UAG		Pengawasan Pembangunan
	101	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	102	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4221.FAG		Pengawasan Pembangunan
	103	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	104	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	105	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	106	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4221.UAG		Pengawasan Pembangunan
	107	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4222.FAG		Pengawasan Pembangunan
	108	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	109	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	110	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	111	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4222.UAG		Pengawasan Pembangunan
	112	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4223.FAG		Pengawasan Pembangunan
	113	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	114	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	115	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	116	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	117	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4223.UAG		Pengawasan Pembangunan
	118	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	119	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
4224.FAG		Pengawasan Pembangunan
	120	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	121	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	122	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	123	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4224.UAG		Pengawasan Pembangunan
	124	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4225.FAG		Pengawasan Pembangunan
	125	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	126	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	127	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	128	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4225.UAG		Pengawasan Pembangunan
	129	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4226.FAG		Pengawasan Pembangunan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	130	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	131	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	132	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	133	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4226.UAG		Pengawasan Pembangunan
	134	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4227.FAG		Pengawasan Pembangunan
	135	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	136	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	137	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	138	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4227.UAG		Pengawasan Pembangunan
	139	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4228.FAG		Pengawasan Pembangunan
	140	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	141	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	142	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	143	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
4228.UAG		Pengawasan Pembangunan
	144	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4229.FAG		Pengawasan Pembangunan
	145	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	146	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	147	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	148	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	149	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
4229.UAG		Pengawasan Pembangunan
	150	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	151	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional
7070.FAG		Pengawasan Pembangunan
	152	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	153	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	154	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	155	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7070.UAG		Pengawasan Pembangunan
	156	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7988.FAG		Pengawasan Pembangunan
	157	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	158	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	159	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	160	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7988.UAG		Pengawasan Pembangunan
	161	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7989.FAG		Pengawasan Pembangunan
	162	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	163	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	164	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	165	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7989.UAG		Pengawasan Pembangunan
	166	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7990.FAG		Pengawasan Pembangunan
	167	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	168	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	169	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	170	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
7990.UAG		Pengawasan Pembangunan
	171	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
7991.FAG		Pengawasan Pembangunan
	172	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
	173	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial
	174	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi
	175	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
	176	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan
7991.UAG		Pengawasan Pembangunan
	177	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	178	Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional

47. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)

Kode	No	Uraian
1	2	3
090.01		Sekretariat Jenderal
3706.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	1	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
3709.BMB		Komunikasi Publik
	2	Komunikasi Publik
3713.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	3	Layanan perlindungan WNI
	4	Layanan Pembinaan WNI
	5	Layanan Keimigrasian
	6	Layanan Kekonsuleran
3714.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	7	Laporan Market Intelligence
3714.PEG		Konferensi dan Event
	8	Pertemuan di Bidang Perdagangan
3725.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	9	Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
3725.AEC		Kerja sama
	10	Pelaksanaan Kerjasama dan Program Mitra Kelembagaan yang Ditindaklanjuti
3725.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	11	Penerimaan Pengaduan Konsumen
3725.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	12	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yang Diberdayakan
3777.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	13	Market Intelligence
3777.PEH		Promosi
	14	Promosi ITPC Barcelona
	15	Promosi ITPC Budapest
	16	Promosi ITPC Busan
	17	Promosi ITPC Chennai
	18	Promosi ITPC Chicago
	19	Promosi ITPC Dubai
	20	Promosi ITPC Hamburg
	21	Promosi ITPC Jeddah
	22	Promosi ITPC Johannesburg
	23	Promosi ITPC Lagos
	24	Promosi ITPC Los Angeles
	25	Promosi ITPC Mexico City
	26	Promosi ITPC Milan
	27	Promosi ITPC Osaka
	28	Promosi ITPC Santiago
	29	Promosi ITPC Sao Paulo
	30	Promosi ITPC Shanghai
	31	Promosi ITPC Sydney
	32	Promosi ITPC Vancouver
3973.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	33	Rekomendasi Kebijakan Perjanjian Perdagangan Internasional
3973.BCE		Penanganan Perkara
	34	Layanan Penanganan Perkara Sengketa Perjanjian Perdagangan Internasional dan Trade Remedies
5048.ABO		Kebijakan Bidang Teknologi Informasi

Kode	No	Uraian
1	2	3
	35	Rekomendasi Kebijakan Bidang Teknologi Informasi
5048.BMA		Data dan Informasi Publik
	36	Data dan Informasi Perdagangan
5048.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	37	Sistem Aplikasi Terpadu Perdagangan
	38	Pengembangan Satu Data Perdagangan
	39	Sistem Aplikasi Manajemen Layanan Kementerian Perdagangan
	40	Sistem Aplikasi Pelaporan Harga (SP2KP)
090.02		Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
3716.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	41	Profil Pola Konsumsi Rumah Tangga Nasional
3716.PEH		Promosi
	42	Promosi Pameran Pangan Nusa
	43	Kampanye Bangga Buatan Indonesia
3720.BKB		Pemantauan produk
	44	Pemantauan Perdagangan
3720.PEA		Koordinasi
	45	Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Dalam Pengawasan
3722.PEB		Forum
	46	Forum Konsultasi Pedagangan Besar dan Eceran termasuk Mobil dan Motor
	47	Forum Dialog Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung
3722.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	48	Pembinaan Pelaku Usaha UMKM di Bidang Distribusi Tidak Langsung
5090.PEA		Koordinasi
	49	Logistik interaktif
5090.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	50	Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Sarana Perdagangan
	51	Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Logistik Nasional
6907.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	52	Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan
	53	Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)
6907.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	54	Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang Diberikan Bimbingan Teknis
090.03		Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3730.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	55	Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
3730.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	56	Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
3730.QDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
	57	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan
3731.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	58	Rekomendasi Kebijakan Ekspor Komoditi Produk Industri dan Pertambangan
3731.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	59	Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
3731.PEB		Forum
	60	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan
3736.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	61	Rekomendasi Kebijakan di bidang Fasilitasi Ekspor dan Impor
3736.BAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha

Kode	No	Uraian
1	2	3
	62	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA dan Penerapan Sertifikasi Mandiri
3736.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	63	Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang
3736.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	64	Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor
	65	Layanan Fasilitasi Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik (IBB)
3737.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	66	Rekomendasi Kebijakan Bidang Impor
3737.PEA		Koordinasi
	67	Koordinasi Pengendalian Impor
	68	Penyusunan dan Pelaksanaan Penyederhanaan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dalam Kerangka Neraca Komoditas
3745.QCB		Perkara Hukum Lembaga
	69	Penanganan Kasus Trade Remedy dan Hambatan Teknis Perdagangan
090.04		Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
3738.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	70	Fasilitasi Persidangan Perundingan Perdagangan Internasional
	71	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional
3738.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	72	Website FTA Helpdesk
3740.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	73	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa
3742.PEC		Kerja sama
	74	Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Dialog
3743.PEC		Kerja sama
	75	Komite Bersama Perjanjian Perdagangan Bilateral
3743.PED		Perjanjian
	76	Indonesia-GCC CEPA
	77	Perjanjian Perdagangan Bilateral Lainnya
3744.PEC		Kerja sama
	78	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Internasional
090.05		Inspektorat Jenderal
3746.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	79	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat Jenderal
090.06		Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
3751.PEC		Kerja sama
	80	Kerja sama kelembagaan ekspor di dalam negeri
	81	Kerja sama kelembagaan ekspor di luar negeri
3751.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	82	Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri
3753.PBB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	83	Analisa dan informasi pasar ekspor
3753.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	84	Layanan Inquiry dan Temu Bisnis
	85	Permanent Trade Exhibition
	86	Export Center
3753.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	87	Penghargaan Pelaku Usaha
6904.PEH		Promosi
	88	Jakarta Muslim Fashion Week
	89	Partisipasi Pameran Luar Negeri Jasa dan Produk Kreatif
	90	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Jasa dan Produk Kreatif

Kode	No	Uraian
1	2	3
	91	Misi Dagang Jasa dan Produk Kreatif
6904.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	92	Pendampingan Pengembangan Ekspor Jasa
	93	Pengembangan Desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC)
	94	Peningkatan Daya Saing Jasa dan Produk Kreatif
6905.PEH		Promosi
	95	Trade Expo Indonesia
	96	Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer
	97	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Primer
	98	Misi Dagang Produk Primer
	99	Buying Mission
6905.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	100	Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer
	101	Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Primer
6906.PEC		Kerja sama
	102	Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
6906.PEH		Promosi
	103	Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Manufaktur
	104	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Manufaktur
	105	Misi Dagang Produk Manufaktur
	106	(Inisiatif Baru) Branding Produk Manufaktur
6906.QDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	107	Peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur
	108	Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera
	109	Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera
090.07		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
3759.BIH		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
	110	Pengawasan Pelaku Usaha SRG
3760.ACD		Perizinan Lembaga
	111	Perizinan Lembaga SRG
3760.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	112	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang
3760.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	113	Fasiltasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG
	114	Fasiltasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG
3760.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	115	Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK
	116	Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK
3761.BBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	117	Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK
3762.BMA		Data dan Informasi Publik
	118	Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK
090.08		Badan Kebijakan Perdagangan
3763.AEA		Koordinasi
	119	Koordinasi Kesekretariatan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional
6901.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	120	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Domestik
6902.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	121	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan
	122	Rekomendasi Kebijakan Kinerja Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan
6903.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan

Kode	No	Uraian
1	2	3
	123	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Internasional
	124	Rekomendasi Kebijakan Kinerja Perdagangan Internasional
090.09		Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
3724.BAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	125	Layanan Pengaduan Konsumen
3724.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	126	Bimbingan Teknis kepada SDM LPKSM
3726.ABB		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	127	Rancangan Kebijakan dan NSPK bidang Metrologi Legal
3726.ACA		Perizinan Produk
	128	Layanan Perijinan Metrologi Legal
3726.ADC		Sertifikasi Produk
	129	Standar Ukuran Metrologi Legal Milik UPT yang Diverifikasi
	130	Standar Ukuran Metrologi Legal milik UML yang diverifikasi
	131	Layanan evaluasi tipe dan tera tera ulang penanganan khusus
3726.AEC		Kerja sama
	132	Implementasi Kerja sama di bidang metrologi legal
3726.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	133	Tindak lanjut pengawasan metrologi legal
3726.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk
	134	UTTP yang diawasi
	135	BDKT yang diawasi
3726.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	136	SDM Metrologi Legal yang diuji dan dibina
3727.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk
	137	Pengawasan Barang Beredar di Pasar
3733.ACA		Perizinan Produk
	138	Sertifikat Sistem Mutu Yang Dipertahankan (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043)
3733.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	139	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3733.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	140	Pemangku Kepentingan yang Dibina
3734.CCH		OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
	141	Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi Yang Dipelihara dan Dikembangkan
3734.PDC		Sertifikasi Produk
	142	Layanan Kalibrasi
3735.ADC		Sertifikasi Produk
	143	Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri
	144	Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri
	145	Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri
	146	Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri
3735.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	147	Sertifikasi Person
3735.BJA		Penyidikan dan Pengujian Produk
	148	Survailen Terhadap Pelanggan
3992.AEF		Sosialisasi dan Diseminasi
	149	Pelaku usaha yang diedukasi
3992.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	150	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan
3992.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk
	151	Pengawasan Post Border
3992.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Kode	No	Uraian
1	2	3
	152	Pengawasan Kegiatan Perdagangan
090.11		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
3707.FAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	153	Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah
3723.SBA		090_Kemendag'D158=
	154	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi
3723.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	155	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan
3756.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	156	Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan
3756.SCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	157	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Ekspor
	158	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Jasa Perdagangan
	159	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Metrologi
	160	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Mutu
6900.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	161	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan

48. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

Kode	No	Uraian
1	2	3
092.01		Kementerian Pemuda Dan Olah Raga
3829.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	1	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional
	2	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional
3829.PEA		Koordinasi
	3	Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi
	4	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga

49. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093)

Kode	No	Uraian
1	2	3
093.01		Komisi Pemberantasan Korupsi
3845.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	1	Pendaftaran LHKPN
	2	Hasil Analisis Pemeriksaan LHKPN
3846.BKC		Pemantauan lembaga
	3	Ketetapan Status Gratifikasi
	4	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi
	5	Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6566.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	6	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Penyuluh Antikorupsi
	7	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Ahli Pembangun Integritas
6567.BKC		Pemantauan lembaga
	8	Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Korupsi
	9	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan

50. Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Daerah (095)

Kode	No	Uraian
1	2	3
095.02		Dewan Perwakilan Daerah
7983.BMB		Komunikasi Publik
	1	Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses)
	2	Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD

51. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)

Kode	No	Uraian
1	2	3
100.01		Komisi Yudisial RI
3866.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	1	Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
	2	Investigasi Pendalaman Kasus
	3	Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA
	4	Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik
3871.BIB		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	5	Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH
	6	Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Lanjutan Atas Dugaan Pelanggaran KEPPH
	7	Laporan Hasil Pemantauan Persidangan
3872.AEA		Koordinasi
	8	Advokasi Represif
3872.PDG		Standarisasi Profesi dan SDM
	9	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan

52. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB (103)

Kode	No	Uraian
1	2	3
103.01		Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3873.AEC		Kerja sama
	1	Kesepakatan Kerja sama bidang Penanggulangan Bencana
3878.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	2	NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB
3878.SCK		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
	3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional
3879.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	4	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Internal
3880.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	5	Penyusunan Pedoman
3882.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	6	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi dan RPKB
3882.UBB		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
	7	Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
3884.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	8	NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik
3884.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	9	Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif
3885.AEH		Promosi
	10	Kegiatan Promosi Terhadap Kelompok Terdampak Bencana
3885.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	11	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana
	12	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daerah Pascabencana
	13	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana
3888.ABS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	14	Indeks Pemulihan Pascabencana
3888.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	15	Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
3891.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	16	NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat
3893.BMA		Data dan Informasi Publik
	17	Peningkatan Komunikasi Bencana
4279.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	18	Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan
4281.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	19	NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
4281.PBS		Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim
	20	Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
4282.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	21	NSPK Bidang Kebencanaan
4284.AEA		Koordinasi
	22	Penguatan Sistem Peringatan Dini
4284.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	23	NSPK Bidang Peringatan Dini terkait Pedoman Peralatan Peringatan Dini Banjir
4285.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Kode	No	Uraian
1	2	3
	24	Pembinaan Penyelenggaraan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada saat Keadaan Darurat Bencana
4286.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	25	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi
4287.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	26	Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Sistem Manajemen Pusdalops
4287.BHC		Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
	27	Layanan Pengendalian Operasi
4287.UAC		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	28	Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan
4289.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	29	NSPK Bidang Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan

53. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP (106)

Kode	No	Uraian
1	2	3
106.01		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6319.ABL		Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	1	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6320.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	2	Rekomendasi Hasil Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP
6321.ADI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	3	Peserta Sertifikasi SDM PBJ
6321.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	4	Pedoman Sertifikasi PBJP
	5	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ
	6	Pedoman Pelatihan PBJ
6321.CAA		Sarana Bidang Pendidikan
	7	Media Pembelajaran Berbasis TIK
6321.CCL		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	8	Sarana Sertifikasi PBJP
6321.DCF		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	9	Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ
6322.BCE		Penanganan Perkara
	10	Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani
6322.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
	11	Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House
	12	Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House
	13	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ
6323.FAI		Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
	14	Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
	15	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ

54. Kementerian Negara/Lembaga: Badan SAR Nasional (107)

Kode	No	Uraian
1	2	3
107.01		Badan SAR Nasional
3972.BKA		Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
	1	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat
	2	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah
	3	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur
6931.DCK		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
	4	Diklat SAR di Permukaan Air

55. Kementerian Negara/Lembaga: Ombudsman RI (110)

Kode	No	Uraian
1	2	3
110.01		Ombudsman Republik Indonesia
5618.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	1	Akses Pengaduan Pelayanan Publik
5618.QAA		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	2	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan
	3	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan
5619.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	4	Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan
5619.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	5	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga
5619.QIE		Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah
	6	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
5731.BIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	7	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan
	8	Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi

56. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pengelola Perbatasan-
BNPP (111)

Kode	No	Uraian
1	2	3
111.01		Badan Nasional Pengelola Perbatasan
4592.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	1	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

57. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam - BPKPB Batam (112)

Kode	No	Uraian
1	2	3
112.01		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Bpkpb Batam)
5126.CCB		OP Sarana Bidang Kesehatan
	1	Pemeliharaan Gedung Instalasi Perawatan dan Kantor
5127.CDK		OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	2	Pemeliharaan dan Perawatan Pertamanan BP Batam
5130.CDN		OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Pemeliharaan Aset Kawasan Agrowisata Sei Temiang
	4	Pemeliharaan Kawasan Wisata Galang
5134.BHC		Operasi Bidang Penanggulangan Bencana
	5	Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kerja BP Batam

58. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (113)

Kode	No	Uraian
1	2	3
113.01		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5096.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	1	Assesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme
5097.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	2	Operasi Intelijen Jaringan Terorisme
	3	Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi
5097.PEA		Koordinasi
	4	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional
5098.ABE		Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	5	Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri
5098.AEC		Kerja sama
	6	Kerja Sama Bilateral Dalam Penanggulangan Terorisme
	7	Kerja Sama Regional dan Multilateral Dalam Penanggulangan Terorisme

59. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Pemilihan Umum (115)

Kode	No	Uraian
1	2	3
115.01		Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
7014.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	1	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Pusat

60. Kementerian Negara/Lembaga: Televisi RI (117)

Kode	No	Uraian
1	2	3
117.01		Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
5153.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	1	Layanan Promo
	2	Konten Media Baru
5155.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	3	Siaran Berita, Current Affairs dan Olahraga
	4	Siaran Program dan Promosi Acara

61. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119)

Kode	No	Uraian
1	2	3
119.01		Badan Keamanan Laut
5735.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	1	Patroli Udara Maritim
5735.QHB		Operasi Bidang Keamanan
	2	Patroli Mandiri

62. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (122)

Kode	No	Uraian
1	2	3
122.01		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6926.ABN		Kebijakan Bidang Sosial
	1	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila
	2	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila
6926.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	3	Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila
6926.QMB		Komunikasi Publik
	4	Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila
	5	Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila
6927.ABD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
	6	Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya
6927.PBD		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM
	7	Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila
	8	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Selaras Dengan Nilai Pancasila
6928.ABN		Kebijakan Bidang Sosial
	9	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila
6929.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	10	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
6929.SCJ		Pelatihan Bidang Sosial
	11	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
6930.ABC		Kebijakan Bidang Politik
	12	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila
	13	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila
6930.PBC		Kebijakan Bidang Politik
	14	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila
6930.PBN		Kebijakan Bidang Sosial
	15	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila

63. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(123)

Kode	No	Uraian
1	2	3
123.01		Sekretariat Jenderal
7012.AEC		Kerja sama
	1	Kerjasama

64. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)

Kode	No	Uraian
1	2	3
124.01		Badan Riset Dan Inovasi Nasional
6680.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi
	1	Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi
6683.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	2	Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri

65. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pangan Nasional (125)

Kode	No	Uraian
1	2	3
125.01		Badan Pangan Nasional
6874.AEC		Kerja sama
	1	Kerja Sama Bidang Pangan
6875.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	2	Pangan yang Terdistribusi
6875.QMA		Data dan Informasi Publik
	3	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan
	4	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
6876.QMA		Data dan Informasi Publik
	5	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan
	6	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
6877.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
	7	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan
6877.QMA		Data dan Informasi Publik
	8	Data Situasi Konsumsi Pangan

66. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Karantina Indonesia (127)

Kode	No	Uraian
1	2	3
127.01		Badan Karantina Indonesia
7003.PDC		Sertifikasi Produk
	1	Layanan Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan

67. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (129)

Kode	No	Uraian
1	2	3
129.01		Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan
7385.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	1	Pengarusutamaan Gender

68. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum (135)

Kode	No	Uraian
1	2	3
135.11		Badan Pembinaan Hukum Nasional
7136.QBA		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
	1	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
7136.QBC		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat
	2	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi
135.13		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
7144.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	3	Pendidikan Taruna Tk II Jurusan Ilmu Pemasyarakatan
	4	Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Ilmu Pemasyarakatan
	5	Pendidikan Taruna Tk IV Jurusan Ilmu Pemasyarakatan
	6	Pendidikan Taruna Tingkat II Jurusan Imigrasi
	7	Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Imigrasi
	8	Pendidikan Taruna Tingkat IV Jurusan Imigrasi
	9	Masa Basis Calon Taruna

69. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (137)

Kode	No	Uraian
1	2	3
137.03		Direktorat Jenderal Imigrasi
6159.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	1	Operasi Intelijen Keimigrasian Tingkat Pusat
6159.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	2	Operasi Gabungan Tingkat Pusat
	3	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Tingkat Pusat
6159.QHB		Operasi Bidang Keamanan
	4	Operasi Mandiri Tingkat Pusat
6161.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	5	Pengawasan Pengungsi
	6	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat
	7	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Tengah
	8	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Timur
	9	Operasi Gabungan di Wilayah Barat
	10	Operasi Gabungan di Wilayah Tengah
	11	Operasi Gabungan di Wilayah Timur
	12	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat
	13	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah
	14	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur
6161.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	15	Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Barat
	16	Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Tengah
	17	Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Timur
6161.QHB		Operasi Bidang Keamanan
	18	Operasi Mandiri di Wilayah
137.04		Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6166.AEC		Kerja sama
	19	Penyusunan Naskah Kerja Sama Bidang Pemasyarakatan
6169.BIF		Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	20	Pengawasan dan Pengendalian Kode Etik Pemasyarakatan
	21	Penyelesaian Pengaduan Layanan Pemasyarakatan
6170.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	22	Layanan Pendampingan Peradilan Anak
	23	Pembimbingan dan Pengawasan
	24	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan
6170.BHB		Operasi Bidang Keamanan
	25	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah
	26	Operasi Keamanan dan Ketertiban

70. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (138)

Kode	No	Uraian
1	2	3
138.01		Sekretariat Jenderal
7575.QEK		Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
	1	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar
	2	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar
	3	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar
	4	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar
7576.QMB		Komunikasi Publik
	5	Layanan Penguatan Karakter Peserta Didik
	6	Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan
	7	Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan
138.02		Inspektorat Jenderal
7591.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	8	Layanan Reviu Inspektorat I
	9	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I
	10	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I
	11	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I
7592.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	12	Layanan Reviu Inspektorat II
	13	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II
	14	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II
	15	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II
7593.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	16	Layanan Reviu Inspektorat III
	17	Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III
	18	Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III
7594.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	19	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan
	20	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
7683.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	21	Layanan Penanganan Pengaduan
138.03		Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, Dan Pendidikan Guru
7570.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	22	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir
	23	Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan
7570.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	24	Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal
7614.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	25	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah
7615.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	26	Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir
	27	Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan
7615.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	28	Penataan Guru Dikdas
7616.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	29	Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir
	30	Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan
7616.UBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	31	Penataan Guru Dikmen dan Diksus
7618.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Kode	No	Uraian
1	2	3
	32	Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir
	33	Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan
138.04		Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
7600.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	34	Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku
	35	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif
	36	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS
7601.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	37	SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter
	38	SD yang Melaksanakan Program UKS
	39	SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku
7602.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	40	SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter
	41	SMP yang Melaksanakan Program UKS
	42	SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku
7603.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	43	Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA
	44	Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMA
	45	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum yang berlaku jenjang SMA
138.05		Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus
7571.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	46	SMK yang Melaksanakan Program UKS
7572.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	47	Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS
	48	Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku
7620.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	49	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja
	50	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri
7620.PEC		Kerja sama
	51	Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
7620.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	52	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan
7622.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	53	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja
	54	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha
7623.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	55	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja
7623.PEC		Kerja sama
	56	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja
7835.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	57	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif
7835.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	58	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan
138.11		Badan Standar, Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan
7607.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	59	Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan
	60	Soal yang Dikembangkan
	61	Model Asesmen Pendidikan
7607.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Kode	No	Uraian
1	2	3
	62	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen
7609.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	63	Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial
7609.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	64	Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual
7609.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	65	Tim Pengembang Kurikulum yang berkompeten
7609.QMA		Data dan Informasi Publik
	66	Sistem Informasi Kurikulum
7610.ABH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	67	Bahan Kebijakan Perbukuan yang Dikembangkan
7610.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	68	SDM Perbukuan yang Terbina
7611.PBH		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
	69	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan
	70	Rapor Pendidikan yang dikembangkan
	71	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan
138.12		Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa
7566.QDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	72	Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah
7567.BMA		Data dan Informasi Publik
	73	Istrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun
7567.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	74	Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi
	75	Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi
7569.QMA		Data dan Informasi Publik
	76	Produk Penerjemahan

71. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (139)

Kode	No	Uraian
1	2	3
139.03		Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
7726.QEJ		Bantuan Pendidikan Tinggi
	1	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha
	2	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
7726.SBA		Pendidikan Tinggi
	3	Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat
7727.PDE		Akreditasi Lembaga
	4	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)
7727.QEI		Bantuan Lembaga
	5	Akselerasi Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi
139.04		Direktorat Jenderal Riset Dan Pengembangan
7737.QEI		Bantuan Lembaga
	6	PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Competitive Fund (BOPTN Penelitian)
	7	PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian)
139.05		Direktorat Jenderal Sains Dan Teknologi
7741.SCI		Pelatihan Bidang Pendidikan
	8	Pelatihan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen LPTK
7743.QEI		Bantuan Lembaga
	9	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)

72. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kebudayaan (140)

Kode	No	Uraian
1	2	3
140.03		Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan Dan Tradisi
7407.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	1	NSPK Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
7408.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	2	NSPK Bidang Sejarah dan Permuseuman
7410.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	3	NSPK Bidang Internalisasi Nilai Budaya dan Hak Kekayaan intelektual
7411.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	4	NSPK Bidang Pelindungan Warisan Budaya
7412.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	5	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya
140.04		Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi Dan Kerjasama Kebudayaan
7415.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	6	NSPK Bidang Diplomasi Kebudayaan
7415.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	7	Fasilitasi Bidang Kebudayaan
7416.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	8	NSPK Bidang Promosi Kebudayaan
7417.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	9	NSPK Bidang Kerja Sama Kebudayaan
140.05		Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan
7420.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	10	NSPK Bidang Film, Musik, dan Seni
7421.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	11	NSPK Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
7422.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	12	NSPK Bidang Budaya Digital
7423.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	13	SKKNI Bidang Kebudayaan
7424.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	14	NSPK Bidang Penyensoran

73. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (142)

Kode	No	Uraian
1	2	3
142.01		Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
7160.PDC		Sertifikasi Produk
	1	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha

74. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kehutanan (143)

Kode	No	Uraian
1	2	3
143.01		Sekretariat Jenderal
7262.BAB		Pelayanan Publik kepada lembaga
	1	Layanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan
143.03		Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
7264.BMA		Data dan Informasi Publik
	2	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKHTL
7268.QAC		Pelayanan Publik kepada badan usaha
	3	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
	4	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH
143.04		Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
7272.PEC		Kerja sama
	5	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)
7273.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
143.05		Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan
7275.REA		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
	7	Pemantauan RHL secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan
143.06		Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
7279.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	8	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan
7280.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	9	NSPK usaha pemanfaatan hutan, Prosedur dan Kriteria
7281.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	10	NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
7282.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	11	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
7283.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	12	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
143.07		Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
7284.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	13	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
7284.QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	14	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial
7286.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	15	Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
7286.QAH		Pelayanan Publik Lainnya
	16	Penangan konflik tenurial di kawasan hutan
7287.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	17	Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
7288.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	18	Layanan Pengendalian Perhutanan Sosial

75. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (144)

Kode	No	Uraian
1	2	3
144.01		Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
7508.BDH		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	1	Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Kalimantan
	2	Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Sulawesi dan Maluku
7508.FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	3	Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Sulawesi dan Maluku
	4	Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Papua
7528.ABJ		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
	5	Kebijakan dan regulasi pengurangan sampah

76. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum (145)

Kode	No	Uraian
1	2	3
145.03		Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
7689.BAH		Pelayanan Publik Lainnya
	1	Layanan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
145.04		Direktorat Jenderal Bina Marga
7696.CBR		Dukungan Teknis
	2	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan
7696.CDC		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
	3	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
7696.CDF		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)
	4	Preservasi Rutin Jembatan
7698.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
	5	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan
	6	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan
145.07		Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
7761.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	7	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi
	8	Rancangan Materi Kompetensi Konstruksi Strategis dan/atau Percontohan
145.12		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7771.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal
	9	Penilaian Kompetensi

77. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pariwisata (147)

Kode	No	Uraian
1	2	3
147.01		Kementerian Pariwisata
7210.PEA		Koordinasi
	1	Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)
7211.PEA		Koordinasi
	2	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I
7212.PEA		Koordinasi
	3	Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II
7214.PEA		Koordinasi
	4	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata
	5	Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
7216.PEH		Promosi
	6	Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur
7218.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	7	NSPK Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata
7218.FAB		Sistem Informasi Pemerintahan
	8	Platform Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
7232.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	9	Sertifikasi Profesi dan SDM
7233.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	10	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang
7234.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	11	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata NHI Bandung
7235.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	12	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata Bali
7236.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	13	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok
7237.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM
	14	Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar

78. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Transmigrasi (152)

Kode	No	Uraian
1	2	3
152.03		Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7165.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	1	NSPK dalam Penataan Persebaran Penduduk
	2	NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	3	NSPK dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7165.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA